

**PENGARUH INTERNASIONALISASI LGBTQIA+ AMERIKA SERIKAT
TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK RUSSIA-AS**

TUGAS AKHIR



Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar

Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Program Studi Hubungan Internasional

Oleh :

ELVA RAY ZABRINA

NIM.2011102434039

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

2024

**PENGARUH INTERNASIONALISASI LGBTQIA+ AMERIKA SERIKAT
TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK RUSSIA-AS**

TUGAS AKHIR



Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar

Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Program Studi Hubungan Internasional

Oleh :

ELVA RAY ZABRINA

NIM.2011102434039

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

2024

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGARUH INTERNASIONALISASI LGBTQIA+ AMERIKA SERIKAT
TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK RUSSIA-AS

TUGAS AKHIR

ELVA RAY ZABRINA

NIM. 2011102434039


Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik

Tanggal, 24 Juli 2024

Mengetahui,
Koordinator TA



Khoirul Amin S.IP., M.A
NIDN. 1115119001

Samarinda,

Dosen Pembimbing



Mohammad Dzikie Aulia Al Farauqi, S.IP., M.A
NIDN. 1115119001

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGARUH EKSPANSI HUKUM LGBTQIA+ AMERIKA SERIKAT TERHADAP
HUBUNGAN DIPLOMATIK RUSSIA-AMERIKA

TUGAS AKHIR

ELVA RAY ZABRINA

NIM. 2011102434039

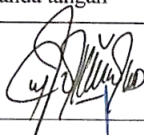

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik

Tanggal, 20 Juli 2024

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Mohammad Dziqie Aulia Al Farauqi, S.IP., M.A NIDN. 1115119001		20 Juli 2024
Khoirul Amin S.IP., M.A NIDN. 1115119001		20 Juli 2024

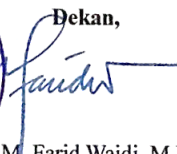
Samarinda, 25 Juli 2024

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Bekan,



Dr. M. Farid Wajdi, M.M., Ph.D.

NIDN. 0605056501

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elva Ray Zabrina
NIM : 2011102434039
Program Studi : S1 Hubungan Internasional
Fakultas : Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Politik
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Ekspansi Hukum LGBTQIA+ Amerika Serikat
Terhadap Hubungan Diplomatik Rusia-Amerika.

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini adalah benar-benar hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya orang lain atau pendapat orang lain yang ditulis dan diterbitkan kecuali sebagai acuan atau kutipan yang ditulis berdasarkan kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Samarinda, 29 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Elva Ray Zabrina
NIM. 2011102434039

ABSTRAK

LGBTQIA+ dan konsep anti-diskriminasi gender menjadi salah satu konsep yang digunakan oleh AS sebagai alat diplomasinya ke berbagai negara, dengan harapan bahwa agenda ini dapat memberikan proteksi yang penuh terhadap kelompok LGBTQIA+ secara global, baik untuk sesama negara liberal hingga negara konservatif seperti Rusia. Di bawah pemerintahan Putin, Rusia menjadi salah satu negara yang memboikot secara keras perilaku ini, dan memberikan hukuman yang berat bagi siapa-siapa saja yang memiliki perilaku LGBTQIA+, atau media-media yang sengaja maupun tidak sengaja menyebarkan hal terkait LGBTQIA+. “anti-gay propaganda” menjadi hukum yang diterapkan oleh Rusia sejak lama dengan tujuan untuk memberikan proteksi dari masuk dan berkembangnya pengaruh LGBTQIA+ di Rusia. Pertentangan ini kemudian turut mempengaruhi hubungan diplomasi kedua negara. Rusia tetap teguh pada pendiriannya untuk terus meningkatkan hukum anti-LGBTQIA+ tersebut, hingga pada beberapa waktu terakhir, Rusia memutuskan untuk menerapkan ekspansi bagi hukum anti-LGBTQIA+ ini, yang tentunya hal ini akan menghilangkan ruang gerak kelompok LGBTQIA+ di negara tersebut, sedangkan AS yang terus menerus menekankan agar Rusia dapat segera memberikan legitimasi hukum terhadap komunitas LGBTQIA+ di negaranya. Pertentangan respons antar kedua negara ini dalam hal akseptansi LGBTQIA+ pada akhirnya akan mengancam hubungan di antara kedua negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menggunakan metode deskriptif, studi ini akan menjelaskan keterkaitan ekspansi agenda LGBTQIA+ Amerika Serikat, respons Rusia, dan hubungan diplomatik kedua negara.

Kata kunci: Amerika Serikat, Diplomasi, Gender, LGBTQIA+, Rusia

ABSTRACT

LGBTQIA+ and the concept of gender anti-discrimination is one of the concepts used by the United States as a diplomatic tool to various countries, with the hope that this agenda can provide full protection for LGBTQIA+ people globally, both for fellow liberal countries and conservative countries such as Russia. Under Putin's rule, Russia has become one of the countries that strongly boycotts this behavior, and imposes severe punishment on anyone who has LGBTQIA+ behavior, or media that intentionally or unintentionally spreads LGBTQIA+ related matters. "Anti-gay propaganda" has been a law implemented by Russia for a long time with the aim of providing protection from the entry and development of LGBTQIA+ influences in Russia. This conflict has affected the diplomatic relations between the two countries. Russia remained steadfast in its stance to continue to improve the anti-LGBTQIA+ law, until recently, Russia decided to implement an expansion of the anti-LGBTQIA+ law, which would certainly eliminate the space for LGBTQIA+ groups in the country, while the US continued to emphasize that Russia could immediately provide legal legitimacy to the LGBTQIA+ community in the country. The conflicting responses between these two countries in terms of LGBTQIA+ acceptance will ultimately threaten the relationship between the two countries both directly and indirectly. Using a descriptive method, this study will explain the interconnectedness of the United States' expansion of its LGBTQIA+ agenda, Russia's response, and the diplomatic relationship between the two countries.

Keywords: Diplomacy, Gender, LGBTQIA+, Russia, US

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Internasionalisasi LGBTQIA+ Amerika Serikat Terhadap Hubungan Diplomatik Russia-Amerika” dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, selaku penulis saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Dr. Muhammad Musiyam, M.T
2. Pembimbing skripsi saya bapak Mohammad Dziqie Aulia Al Farauqi, S.IP., M.A yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan, khususnya masa penulisan skripsi sehingga skripsi saya menjadi lebih terarah dan dapat diselesaikan secara tepat waktu.
3. Jajaran dosen program Studi Hubungan Internasional yang membimbing serta memberikan arahan, ide-ide serta motivasi selama masa perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi
4. Ibu, nenek, kakek, dan om saya yang telah memberikan dukungan secara finansial dan mental sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya hingga saat ini.
5. Pacar saya Ajie Aditya yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
6. Sahabat saya, Devi dan Lili yang telah mendukung saya selama masa perkuliahan dan menemani saya.
7. Sahabat saya, Dini, Jahro, Rara, Chella yang telah menemani saya dan memberi support sedari SMP/MTs hingga saat ini.
8. Angkatan 2020 Prodi Hubungan Internasional dan teman-teman saya lainnya yang selalu mendukung dan membantu memberikan motivasi kepada saya selaku penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan. Dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangannya dalam skripsi ini. Terakhir harapan penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Samarinda, 29 Juni 2024

Penulis,

Elva Ray Zabrina
NIM. 2011102434039

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Identifikasi Masalah	15
C. Batasan Masalah	15
a. Batasan Materi	15
b. Batasan Waktu	15
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	16
a. Manfaat Teoretis	16
b. Manfaat Praktis	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Kajian Teori atau Konsep	17
a. Norm Life Cycle Theory	17
b. LGBTQIA+ politics sebagai alat diplomasi Amerika Serikat	20
B. Review Literatur	21
a. Cultural and geopolitical conflicts between the West and Russia: Western NGOs and LGBTQIA+ activism (Radzhana Buyantueva)	21
b. Vladimir Putin dan Dekonstruksi Soft Power Rusia (Mohammad Dziqie Aulia Al Farauqi)	22
c. The Global Dialectics of Homonationalism and Homophobia (Hadley Z. Renkin & Victor Trofmov)	23
d. LGBT Rights Activism and Homophobia in Russia (Radzhana Buyantueva)	23
C. Kebaruan Penelitian	24
BAB III METODOLOGI	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Sumber Penelitian	25
C. Teknik Pengumpulan Data	25

D. Teknik Analisa Data	26
BAB IV PEMBAHASAN	26
A. Kontekstualisasi Gender dan Seksualitas dalam LGBTQIA+	26
B. LGBTQIA+ Sebagai Agenda Politik AS.....	28
a. Perdebatan publik dalam akseptansi LGBTQIA+.....	30
b. Motif Kultural dan Politik Dalam Hegemoni Amerika Serikat	31
C. Rusia dan Agenda Politik LGBTQIA+.....	31
a. Ideologi konservatif dalam pemerintahan Rusia	34
b. Peran ajaran agama Kristen Ortodox dalam pembentukan hukum anti-LGBTQIA+ di Rusia.....	37
c. <i>Scope of Interest</i> Rusia dalam agenda politik LGBTQIA+ secara Internasional	38
D. Interaksi Rusia dan AS di dalam agenda politik LGBTQIA+.....	39
a. Tensi Diplomatik antar AS dan Rusia	40
E. Interaksi AS dan Rusia dalam Teori Norm Life Cycle.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
GLAAD	: <i>Gay and Lesbian Alliance Against Defamation</i>
GLIFAA	: <i>Gays and Lesbians in Foreign Affairs Agencies</i>
GLSEN	: <i>Gay, Lesbian & Straight Education Network</i>
LGBTQIA+	: <i>Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan dalam penyebaran suatu norma menurut Finnemore dan Sikkink.....	18
Gambar 2. Perbandingan kebijakan terhadap kelompok LGBTQIA+ pada masa pemerintahan Trump dan Joe Biden	29
Gambar 3. Keselarasan Interaksi antara Amerika Serikat dan Rusia dalam agenda politik LGBTQIA+ dan teori Norm Life Cycle.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak terpilihnya Joe Biden sebagai pemimpin negara, dapat ditelaah bahwa kelompok LGBTQIA+ mendapat atensi lebih secara global, terutama jika mengaitkan akseptansi mereka dengan prinsip non-diskriminasi yang diperkenalkan oleh UNCHR, serta bagaimana akseptansi dari kelompok tersebut menjadi suatu hal yang menjadi poin utama dalam politik kebijakan AS di bawah Joe Biden. Selama masa pemerintahannya hingga saat ini, dapat dilihat bahwa Joe Biden membawa isu LGBTQIA+ sebagai bagian dari isu politik yang harus dihadapi secara global (The White House, 2023). Saat ini, LGBTQIA+ menjadi suatu tren yang dapat mempengaruhi arah serta komunikasi politik suatu negara. Popularitas dan eksistensi LGBTQIA+ di suatu negara ada karena berbagai macam interaksi antar aktor, baik dari aktor negara seperti lembaga legislatif dan lembaga politik lain, maupun non-negara yang berupa komunitas sosial, *Non-Governmental Organizations*, dan lain sebagainya yang juga berfokus pada gender dan LGBTQIA+. Aktor-aktor ini, di bawah kondisi politik, ekonomi, dan kondisi sosial budaya yang berbeda, kemudian mempengaruhi pembentukan identitas gender, baik secara sadar maupun tidak sadar (Fábián et al., 2021). Beragamnya orientasi seksual masyarakat yang terus-menerus berkembang menjadikan semakin besarnya akseptansi kelompok ini di berbagai negara. Negara-negara liberal seperti AS, dan beberapa negara liberal lainnya juga turut melegalkan perilaku LGBTQIA+ di negaranya secara hukum, dan turut menjadikan LGBTQIA+ sebagai salah satu kepentingan politik negaranya.

Hak asasi manusia dan gender saat ini menjadi dua hal yang saling berkaitan, dan tentunya saling berpengaruh satu sama lain. Jika berbicara perihal penyebaran dan asal usul adanya LGBTQIA+, tentunya berpijak pada suatu asumsi bahwa seksualitas manusia tidak semata-merta murni sebagai suatu fenomena alam, tetapi juga bagian dari konstruksi budaya dan sejarah. Penyebaran LGBTQIA+ di seluruh dunia dipercaya sebagai suatu hal yang berasal dari paham liberal yang dicanangkan oleh AS. Hadirnya aktivis LGBTQIA+ di AS yang melakukan gerakan untuk menyebarkan narasi bahwa LGBTQIA+ merupakan suatu hal yang harus dinormalisasikan sekaligus membuat jaringan kelompok LGBTQIA+ yang lebih luas antar negara atau jaringan kerja sama Transnasional, membuat cepatnya penyebaran LGBTQIA+ di berbagai negara di dunia. Sementara terjalannya hubungan antar kelompok dan khususnya aktivis LGBTQIA+ antar negara, yang sekecil-kecilnya terjadi di negara-negara Barat, manifestasi dari politik LGBTQIA+ global menjadi semakin kuat dan juga semakin tertata, dimana tujuan dari aktivis tersebut kemudian berfokus pada lobi lembaga internasional melalui wacana hak asasi manusia (Szulc, 2018). Pada tahun 2021, Presiden

Biden mengeluarkan sebuah memorandum kepresidenan yang mendeklarasikan perluasan perlindungan terhadap hak-hak kelompok *lesbian, gay, biseksual*, serta *queer*; sekaligus menetapkan kemungkinan sanksi terhadap negara yang tidak ingin mematuhi hukum tersebut (dapat berupa sanksi keuangan) (Alper & Shalal, 2021). Proteksi terhadap kelompok LGBTQIA+ dianggap sebagai salah satu objek diplomasi US yang termasuk di dalam agenda *advancing human rights around the world*. US menganggap bahwa pastinya banyak area yang tidak mendukung hak-hak LGBTQIA+ namun US juga percaya bahwa US masih dapat mengajak negara-negara (anti-LGBTQIA+) tersebut dengan mengatakan bahwa hukum ini ditujukan untuk menghentikan kekerasan, diskriminasi, dan menghapus stigma terhadap kelompok LGBTQIA+. Selain itu, jika terdapat negara-negara yang masih tidak dapat menerima hukum tersebut, maka negara tersebut dianggap merugikan pembangunan di negaranya sendiri (Gilliam & Stern, 2022).

Sejak tahun 2014, tepatnya pada *Olympic Winter Games in Sochi*, Rusia di bawah pemerintahan Putin mengumumkan akan menerapkan Internasionalisasi anti-LGBTQIA+ di negaranya, dimana secara langsung, Rusia menyatakan bahwa perilaku homoseksual merupakan hal yang menyimpang dan menjadi suatu tindakan kriminal di Rusia. Hukum anti-LGBTQIA+ atau disebut juga sebagai hukum melawan propaganda hubungan seksual non-tradisional kemudian menjadi titik berat terjadinya perang *International Culture over LGBTQIA+ rights* (Picq & Thiel, 2015). Dalam perkembangannya, Rusia menetapkan kebijakan-kebijakan turunan dari kebijakan anti-LGBTQ propaganda law tersebut, seperti diberlakukannya hukuman untuk siapa-siapa saja yang membuka diskusi bebas (baik di sosial media maupun secara terbuka) tentang LGBT, hukuman untuk siapa-siapa saja yang secara sengaja ataupun tidak sengaja menyebarkan ideologi LGBT (karena penyebaran LGBT ini dianggap berada di bawah payung yang sama dengan penyebaran pornografi), serta hukuman-hukuman lainnya (Andersson, 2022).

Joe Biden mengeluarkan *statement* bahwa pada dasarnya seluruh gender dan identitas (dalam konteks ini LGBTQIA+) berhak untuk diperlakukan layaknya manusia pada umumnya. Kemudian pada 4 Februari 2021, Presiden Joe Biden mengeluarkan *Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex around the world* yang menegaskan bahwa AS di bawah kepemimpinannya tidak akan segan-segan untuk menghukum (kriminalisasi) negara-negara yang tidak patuh atau “memberikan diskriminasi” terhadap kelompok LGBTQIA+, dimana hal ini juga menjadi penanda bahwa AS memberi *highlight* terhadap negara Rusia sebagai negara yang “memberikan diskriminasi” terhadap kelompok LGBTQIA+ (The White House, 2021). Hal ini kemudian menjadi titik persinggungan antara Rusia dan AS dalam agenda politik gender AS.

Persinggungan ini akan menjadi akar permasalahan dalam penelitian ini, dan di samping hal itu, terdapat faktor-faktor lainnya yang juga mendukung intensitas politik antar kedua negara di dalam agenda akseptansi LGBTQIA+. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai persinggungan norma kedua negara, dan perkembangan hubungan diplomatik di dalam agenda akseptansi LGBTQIA+.

B. Identifikasi Masalah

Setelah berakhirnya perang dingin, Russia dan AS masih memiliki intensi untuk mempromosikan sekaligus memberikan proteksi dari ideologi dari masing-masing negara, dimana Russia yang dominan dengan paham komunisnya, serta AS dengan paham liberalnya. Rusia menganggap apa-apa saja yang dihasilkan oleh AS baik secara fisik dan non-fisik, sebagai sebuah ancaman, termasuk paham LGBTQIA+ yang sudah sejak lama dinilai sebagai “produk” barat. Hukum “*anti-gay propaganda*” menjadi salah satu senjata yang digunakan oleh Rusia untuk melawan salah satu ideologi barat yaitu LGBTQIA+ (Al Jazeera, 2023). Sejak masa pemerintahan Stalin, setelah berakhirnya rezim partai komunis, Rusia (yang menjadi bagian dari Uni Soviet) kembali menetapkan hukum kriminalisasi homoseksualitas. Hukum ini terus menerus berlanjut dan berkembang, bahkan hingga saat ini. Beberapa waktu belakangan ini, Rusia di bawah pemerintahan Putin, memutuskan untuk memperketat atau mengInternasionalisasi tersebut, dimana hal ini menjadi salah satu bagian dari agenda sosial konservatif Putin (Sauer, 2023).

C. Batasan Masalah

a. Batasan Materi

Secara spesifik, penelitian ini hanya akan membahas pengaruh Internasionalisasi LGBTQIA+ AS selama masa pemerintahan Joe Biden, yang kemudian hal ini akan berpengaruh terhadap hubungan antara Rusia dan AS. Penelitian ini juga akan menyorot intensi politik kedua negara, serta menyorot respons komunitas sosial tertentu (terutama di Rusia) akan adanya hukum anti-LGBTQIA+ Rusia.

b. Batasan Waktu

Dalam penelitian ini, terdapat tiga waktu penting yang turut dibahas untuk menemukan akan dimulai dari *Memorandum on Protecting Rights of LGBTQ People Abroad* yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2021, Perang Rusia dan Ukraina yang terjadi pada tahun 2022, serta Internasionalisasi anti-LGBTQIA+ Rusia pada tahun 2023.

D. Rumusan Masalah

Dalam proses analisa pada penelitian ini adapun rumusan masalah yang muncul sebagai acuan utama penelitian, yaitu *Apa pengaruh dari Internasionalisasi LGBTQIA+ Amerika Serikat terhadap hubungan diplomatik Rusia-AS?*

E. Tujuan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada jenjang Strata-1
2. Sebagai pemenuhan salah satu tugas pada perkuliahan
3. Menganalisis pengaruh dari Internasionalisasi LGBTQIA+ Amerika Serikat terhadap hubungan diplomatik Rusia-AS, yang dimulai dengan analisa mengenai Internasionalisasi LGBTQIA+ Amerika Serikat, kemudian respons negara Rusia terhadap Internasionalisasi tersebut dan keberlanjutan hubungan diplomatik antara kedua negara.

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi acuan dari penelitian-penelitian selanjutnya, terutama bagi penelitian yang memiliki basis gender dan identitas, kebijakan AS, serta studi Rusia.

b. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis yang terdapat di dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Menambah wawasan terutama dalam bidang politik gender dan identitas.
2. Memberikan kontribusi terhadap penelitian di beberapa bidang seperti hubungan internasional, politik AS-Rusia, serta gender dan identitas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

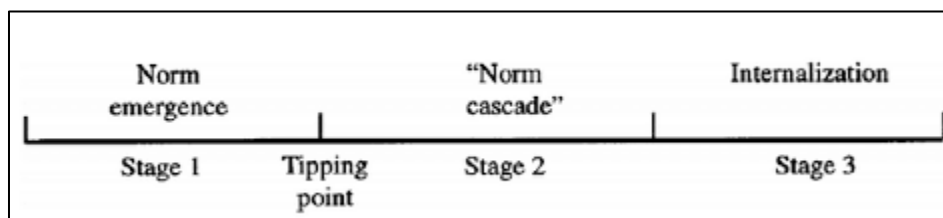
A. Kajian Teori atau Konsep

a. Norm Life Cycle Theory

Penelitian ini selanjutnya menggunakan Teori *Norm Life Cycle* dalam menelaah interaksi politik atau interaksi diplomatis antara Rusia dan AS dalam agenda politik LGBTQIA+. Adanya sistem multi-agen yang timbul dalam pola interaksi hubungan internasional berkaitan dengan muncul dan berkembangnya teori *norm life cycle* dalam hubungan Internasional. Karena sistem multi-agen ini terinspirasi dari pola interaksi sosial Masyarakat, sistem ini pada akhirnya tidak hanya mengadaptasi mekanisme koordinasi seperti konvensi dan norma, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana norma-norma tersebut muncul, menyebar, dan berubah dari waktu ke waktu. *Norm Life Cycle* meninjau mengenai kajian komprehensif serta dinamika dalam sistem multi agen yang normatif. Norma akan selalu berubah di tengah-tengah masyarakat seiring berjalannya waktu. Norma yang telah lama atau tidak sesuai dapat dicabut, digantikan dengan norma yang baru, atau dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat itu. Perubahan norma memberikan fokus khusus pada definisi mekanisme yang dibutuhkan di dalam sistem multi-agen tersebut (Frantz & Pigozzi, 2018). *Norm life cycle* yang dikemukakan oleh Finnemore dan Sikkink merupakan salah satu teori yang paling dikenal dan merupakan awal dari perkembangan teori

norm life cycle. Finnemore dan Sikkink menjelaskan kemunculan norma-norma baru dan pergeseran norma yang berdasar pada beberapa pertanyaan utama seperti dari mana norma-norma itu berasal, bagaimana norma-norma itu berubah, dan apa peran yang dimainkan norma dalam perubahan politik. *Norm life cycle* oleh Finnemore dan Sikkink dibagi menjadi tiga tahap yaitu *norm emergence*, *norm cascade*, and *internalization* (Richter, 2018).

Gambar 1. Tahapan dalam penyebaran suatu norma menurut Finnemore dan Sikkink



Sumber: Finnemore & Sikkink, 1998, p. 896.

Dalam membuat analisa mengenai interaksi antara Rusia dan AS di dalam agenda akseptansi LGBTQIA+ secara global ini dapat dikorelasikan dengan teori *Norm Life Cycle*. *Norm Life Cycle* secara garis besar menjelaskan mengenai bagaimana sebuah norma (dalam konteks penelitian ini bentuknya berupa LGBTQIA+) dibentuk dan muncul di tengah-tengah masyarakat. Dalam penjelasannya, Finnemore dan Sikkink berasumsi bahwa perpindahan norma itu sendiri (dari *emergence* menuju *cascade*) hanya akan terjadi apabila norma tersebut telah diterima oleh sejumlah aktor atau dikatakan sebagai *threshold point*, dan sebuah norma tidak selalu menyelesaikan suatu *life cycle*. Kemudian, Ketika norma tersebut tidak dapat diterima oleh aktor-aktor tertentu atau tidak mencapai *threshold point*, maka norma tersebut tidak akan berpindah dari *emergence* menuju *cascade*. Tahapan-tahapan yang berbeda dari model Finnemore dan Sikkink didukung oleh contoh-contoh yang berasal dari gerakan hak pilih Perempuan (*women's movement of suffragettes*) dan hukum perang (Frantz & Pigozzi, 2018). Teori ini kemudian juga dapat direfleksikan melalui interaksi politik yang terjadi antara AS dan Rusia di dalam agenda politik LGBTQIA+ antar kedua negara.

1. *Norm Emergence*

Pada tahap awal pembuatan norma, *norm entrepreneur* merupakan aktor yang berpengaruh dalam tahapan ini. Selaku agen atau aktor yang berkomitmen untuk membujuk massa untuk mendukung norma-norma baru atau mengubah norma-norma yang sudah ada untuk mencapai perilaku yang diinginkan dalam suatu negara atau komunitas. Sebagai contoh, Finnemore dan Sikkink menyebutkan Henry Dunant yang

berperan penting dalam pembentukan norma non-kombatan terhadap dokter dan tantara yang terluka (Frantz & Pigozzi, 2018). Menurut Finnemore dan Sikkink, *norm entrepreneur* yang sebelumnya dijelaskan merupakan aktor yang bertindak dalam platform organisasi seperti LSM. *Norm entrepreneur* selaku agen yang berperan untuk mempromosikan norma yang ia miliki. Ketidak pastian penerimaan norma di Masyarakat juga pada akhirnya menjelaskan mengapa *norm entrepreneur* sering kali melakukan tindakan kontroversial atau bahkan ilegal. Hal ini kemudian dapat ditunjukkan pada sikap Joe Biden dalam menyuarakan akseptansi kelompok LGBTQIA+ yang bahkan ditujukan kepada negara-negara konservatif seperti Rusia. Dalam beberapa pidatonya, Joe Biden menyuarakan bahwa akseptansi ini merupakan bentuk perbaikan kepemimpinan moral bagi pemimpin-pemimpin tersebut (Bertrand et al., 2021). Dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa peran Joe Biden sebagai *norm leader* berpengaruh terhadap penyebaran norma-norma dan akseptansi LGBTQIA+ secara global.

2. *Norm Cascade*

Setelah *threshold point* dalam *norm emergence* berhasil dilewati, maka norma tersebut berhasil memasuki tahapan *cascade*. Dalam tahap ini, tingkatan penerimaan norma di tengah individu-individu akan meningkat dengan cepat. Dalam *cascading*, mekanisme yang digunakan untuk penerimaan suatu norma tertentu adalah semacam persuasi yang dilakukan oleh aktor/agen tertentu kepada pihak lain yang seharusnya menerima norma tersebut. Dalam konteks negara, bujukan atau persuasi tersebut akan bersandar pada kebutuhan negara untuk diakui sebagai anggota dari organisasi Internasional. Negara tentunya memiliki keinginan untuk memperoleh atau meningkatkan legitimasi secara internal dan internasional. Hal ini dapat digambarkan dengan persuasi Joe Biden dalam beberapa *speech act* yang dilakukannya untuk meningkatkan konsep anti-diskriminasi terhadap kelompok LGBTQIA+. *Pressure of conformity* serta keinginan untuk meningkatkan harga diri yang juga menjadi kebutuhan para *norm leaders* menjadi alasan utama dari perilaku tersebut (*cascading*).

Namun kemudian, seperti yang sudah dijelaskan dalam premis sebelumnya bahwa sebuah norma belum tentu dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, dan internalisasi belum tentu tercapai secara mudah. Hal ini disebabkan oleh adanya peran dari *norm protector* di tengah-tengah Masyarakat tersebut. Ada berbagai hambatan yang muncul dan menyebabkan tidak tercapainya tahap internalisasi dari suatu norma. Hambatan ini dapat berupa ke tidak setujuan akan adanya suatu norma di tengah-tengah masyarakat karena

kuatnya pengaruh norma yang sudah dimiliki sebelumnya, atau pertentangan dengan aturan pemerintah yang juga berdasarkan oleh nilai-nilai tradisional dari negara tersebut, yang menyebabkan adanya legitimasi atas norma yang sudah dimiliki oleh negara tersebut.

3. *Internalization*

Jika pada akhirnya norma mencapai tahap ketiga atau tahap terakhir, maka pada akhirnya norma tersebut telah di internalisasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai tahapan ketika norma tersebut telah sepenuhnya diterima dan tidak lagi menjadi objek perdebatan. Setelah norma tersebut diterima, maka individu akan menyesuaikan diri mereka tanpa benar-benar memikirkannya atau tanpa pertimbangan apapun.

Konteks internalisasi ini dapat digambarkan dengan adanya akseptansi kelompok LGBTQIA+ di tengah-tengah Masyarakat Rusia. Walaupun terdapat banyak opresi dari pemerintah yang ditujukan untuk kelompok LGBTQIA+, bahkan hingga pemberian label sebagai kelompok ekstremis, kelompok ini masih tetap berjuang untuk menyuarakan akseptansi mereka pada level politik/pemerintahan (Litvinova, 2024).

b. LGBTQIA+ politics sebagai alat diplomasi Amerika Serikat

Saat ini agenda politik LGBTQIA+ menjadi suatu hal yang sering kali dipraktikkan dari kelompok pemerintahan negara-negara barat sebagai suatu strategi dalam hal *bargaining position* untuk mereka, dengan dalih bahwa politik LGBTQIA+ merupakan salah satu bagian dari upaya menghapuskan diskriminasi dari berbagai kelompok, dan bentuk dari promosi akan kebebasan berekspresi bagi suatu individu yang harus dihargai. Dalam praktiknya sendiri, politik LGBTQIA+ didukung oleh LSM-LSM barat yang turut dibantu oleh adanya gerakan LGBTQIA+ lokal membentuk pola politik transnasional yang majemuk, kemudian menciptakan suatu bentuk aturan baru mengenai cara negara mengatur dan melindungi negaranya. Politik ini selanjutnya mempromosikan bahwa individu-individu yang termasuk ke dalam golongan LGBTQIA+ bukanlah minoritas yang hina, namun sebagai pembawa hak asasi manusia dengan harkat dan martabat yang harus dihargai, dan sebagai salah satu simbolisasi dari “kebebasan berekspresi” (Thiel, 2014).

Dalam konteks *mass democracies*, komunitas-komunitas yang terpinggirkan atau *marginalized* cenderung mencari cara untuk menarik opini kelompok mayoritas untuk mengamankan hak-hak mereka. Salah satu strategi yang biasanya digunakan oleh kelompok tersebut adalah *respectability politics*, di mana dalam strategi ini, kelompok tersebut menunjukkan bahwa mereka bukan kelompok yang hadir untuk menolak norma yang ada di

tengah-tengah masyarakat, melainkan hadir sebagai kelompok yang turut mengikuti norma dan aturan, tidak memberikan ancaman dan berperilaku “pantas”. Dari strategi tersebut, kelompok terpinggirkan ini berharap bahwa kelompok dominan/mayoritas akan melihat kesamaan dengan kelompok yang terpinggirkan dan akhirnya menganggap mereka dapat memiliki hak yang sama. Selain itu, kelompok-kelompok ini biasanya akan menyoroti anggota-anggota mereka yang paling dihormati seperti tokoh-tokoh penting dan menekankan bagaimana mereka mengikuti nilai-nilai yang ada pada kelompok yang dominan (Jones, 2022). Hal ini juga menjadi strategi yang diadopsi oleh kelompok LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer) dalam beberapa dekade terakhir, dengan tujuan untuk mencoba dan memenangkan dukungan dari kelompok heteroseksual di AS.

Dalam rekam jejaknya, AS (di bawah kepemimpinan Joe Biden) telah mengeluarkan banyak *project* serta aturan-aturan yang berlaku secara domestik maupun internasional yang dapat menunjang keselamatan serta akseptansi kelompok LGBTQIA+. Dengan berbagai klaim yang dilontarkan Joe Biden dalam beberapa konferensinya, seperti *These are our kids*, *These are our neighbors* untuk kelompok LGBTQIA+ tersebut, serta *unjustified and ugly* untuk negara-negara yang masih tidak terbuka akan akseptansi kelompok ini (Superville, 2023). Joe Biden juga memberikan fasilitasi kesehatan (perlindungan untuk pasien medis gay dan transgender, yang melarang penyedia layanan kesehatan dan perusahaan asuransi yang didanai oleh pemerintah federal untuk melakukan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender) (Weiland, 2024), perlindungan dari diskriminasi di berbagai lembaga pendidikan, serta perlindungan lainnya yang dapat memberikan kesuksesan perlindungan kelompok LGBTQIA+.

B. Review Literatur

a. **Cultural and geopolitical conflicts between the West and Russia: Western NGOs and LGBTQIA+ activism (Radzhana Buyantueva)**

Penelitian ini berfokus pada keterkaitan antara LSM negara-negara barat dan juga aktivis LGBTQIA+ Rusia dalam agenda penyebarluasan konsep-konsep atau ideologi liberalisme (yang ditandai oleh akseptansi LGBTQIA+ dari pihak masyarakat Rusia) di Rusia, yang tidak dapat tercapai karena adanya pengaruh konsep geopolitik antara Rusia dan negara-negara Barat. Masuknya LSM Barat ke dalam masyarakat Rusia dipengaruhi oleh perubahan kebijakan luar negeri dan orientasi geopolitik negara. Adanya aspirasi Rusia pada akhir 1980-an hingga 1990-an untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Barat telah membuka jalan bagi LSM Barat untuk membantu pengembangan masyarakat sipil di negara tersebut.

Namun, sejak saat itu, hubungan antara Barat dan Rusia menjadi dingin secara signifikan. Selain pengaruh besar dari adanya perang dingin, pengaruh perkembangan geopolitik (seperti perluasan NATO dan Uni Eropa, serta “revolusi warna”) memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap Kremlin (kelompok pemerintahan Rusia) terhadap interaksi negara-negara Barat terhadap Rusia (Buyantueva, 2022).

Secara garis besar, keterlibatan LSM Barat di dalam masyarakat sipil Rusia serta berkembangnya aktivis LGBT di Rusia dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri dan orientasi geopolitik negara. Wacana konservatif anti-Barat Kremlin dan perubahan legislatif (misalnya, hukum "*foreign agent*", hukum "*undesirable organisations*") telah memengaruhi hubungan internasional aktivis LGBT Rusia sehingga mengganggu kemungkinan kerja sama dengan mitra-mitra Barat. Sejak awal 1990-an, LSM-LSM Barat telah menawarkan dukungan materi dan non-materi kepada para aktivis dan organisasi LGBT Rusia, serta melakukan lobi-lobi untuk tekanan internasional terhadap negara Rusia. Namun, dalam dua dekade terakhir, Kremlin telah melakukan upaya yang konsisten untuk menghalangi bantuan Barat kepada masyarakat sipil Rusia, termasuk organisasi dan aktivis LGBT. Penelitian ini selanjutnya akan membantu dalam pembahasan mengenai perkembangan gerakan LGBTQIA+ di dalam masyarakat Rusia selaku negara yang dikenal sebagai negara konservatif.

b. Vladimir Putin dan Dekonstruksi Soft Power Rusia (Mohammad Dziqie Aulia Al Farauqi)

Vladimir Putin merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dan terkenal dengan strategi *hard diplomacy* untuk mencapai tujuan negaranya. Dalam penelitian ini, peneliti mengaitkan perspektif pos modernisme dan rekonstruksi *soft power* yang dimiliki oleh Vladimir Putin. Dekonstruksi ini muncul akibat adanya cara pandang Putin terhadap negara luar dan negara Rusia sendiri sebagai penentang besar akan liberalisasi atau paham barat yang dimiliki oleh AS. Vladimir Putin menganggap bahwa penggunaan *soft power* adalah suatu metode yang kompleks dalam hal mencapai tujuan luar negeri suatu negara yang dimana hal ini didukung dengan adanya penguatan sistem informasi dan media tanpa melibatkan penggunaan senjata di dalamnya. Hal ini kemudian bertentangan dengan status quo yang ada di Rusia, dimana Putin sendiri membatasi aksesibilitas publik terhadap media (Alfarauqi, 2017).

Selanjutnya penelitian ini memberikan *disclosure* mengenai bagaimana Rusia membangun konsep *soft power a la* Rusia yang dinamakan *Rossotrudnichestvo*, yang ditujukan sebagai bentuk respons terhadap kegiatan *NGO's* barat atau agen *soft power* dengan

potensi dapat memanipulasi opini masyarakat untuk melakukan campur tangan secara langsung dalam urusan kebijakan domestik dari negara-negara yang berdaulat untuk kemudian ikut campur dengan isu-isu politik di negara lain.

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam menelaah sikap Rusia dalam agenda politik LGBTQIA+ yang dimiliki oleh AS, mengetahui bahwa kedua negara memiliki tensi yang sangat tinggi dalam berbagai agenda terutama dalam penyebaran ideologi-ideologi (liberal atau konservatif) antar kedua negara.

c. The Global Dialectics of Homonationalism and Homophobia (Hadley Z. Renkin & Victor Trofimov)

Pada 25 Juni 2020, di awal *queer Pride Month*, Kedutaan Besar AS di Moskow mengibarkan *rainbow flag* (bendera khas kelompok LGBTQIA+) di gedungnya, sebagai simbol dukungan untuk kelompok LGBTQIA+ sekaligus menjalankan misi diplomatik AS bersamaan dengan kedutaan dan konsulat AS di seluruh dunia. *Pride month* di tahun itu bertepatan dengan adanya pemungutan suara untuk amandemen Konstitusi Rusia yang secara eksplisit mendefinisikan pernikahan sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan. Pengibaran bendera Pelangi oleh Kedutaan Besar AS menimbulkan kontroversi yang cukup kuat, yang juga memperumit hubungan AS dan Rusia yang sudah tegang sebelumnya. seorang senator Rusia dan pakar TV konservatif menafsirkan bendera tersebut sebagai salah satu bentuk campur tangan AS secara langsung dalam urusan dalam negeri Rusia.

Secara garis besar, penelitian ini menganalisis interaksi antara negara-negara “liberal” dengan negara-negara konservatif yang tidak memberi akseptansi atau hak-hak terkait kelompok LGBTQIA+ di negaranya. Dapat ditelaah bahwa interaksi di antara kedua jenis negara (terutama dalam agenda *contemporary sexual politics*) dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti kondisi geopolitik antar negara, hubungan negara secara lokal (internal) dan global dari negara tersebut (Renkin & Trofimov, 2023). Penelitian ini kemudian menjawab mengapa interaksi yang terjadi pada negara-negara tersebut dapat terjal walaupun kedua pihak memiliki paham yang jauh berbeda antara satu sama lain.

d. LGBT Rights Activism and Homophobia in Russia (Radzhana Buyantueva)

Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, persepsi kelompok LGBT Rusia tentang masyarakat yang menjadi lebih toleran membantu keputusan mereka untuk mulai berpartisipasi dalam gerakan aktivisme. Namun, hal itu berubah ketika sikap masyarakat terhadap hubungan sesama jenis menjadi semakin tidak toleran dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu alasan utamanya adalah pengaruh wacana konservatif negara yang diwujudkan

dalam pengesahan undang-undang propaganda anti-gay. Elit agama dan politik menggunakan argumen nilai-nilai tradisional dan retorika homofobia, yang dianggap bermanfaat untuk menarik dukungan publik. Pelecehan dan kekerasan terhadap kelompok LGBT yang dilakukan oleh anggota kelompok dan individu nasionalis dan homofobia serta pihak berwenang memberikan gambaran yang mengganggu tentang meningkatnya homofobia di negara ini, yang memengaruhi kesiapan kelompok LGBT untuk bergabung dalam aktivisme. Aktivisme hak-hak LGBT Rusia berada dalam lingkungan yang tidak bersahabat (Buyantueva, 2018).

Penelitian ini selanjutnya akan memberikan eksekusi terhadap adanya gerakan anti-LGBTQ dari berbagai lapisan Masyarakat dan bagaimana perkembangan penolakan gerakan LGBT di Rusia secara kronologis.

C. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pola komunikasi politik dari kedua negara dengan *impact* yang berfokus pada kedua negara tersebut. secara garis besar, penelitian ini tidak hanya membahas mengenai interaksi politik, namun juga membahas mengenai dampak dari Internasionalisasi tersebut, mengingat pada saat ini LGBTQIA+ menjadi suatu arah politik yang cukup menarik untuk ditelaah karena kompleksitas dari penyebaran serta akseptansinya serta berbagai pertentangan yang terdapat dalam proses interaksi hukumnya. Pada literatur-literatur sebelumnya hanya dibahas bahwa adanya politik LGBTQIA+ di suatu negara pastinya sebagian besar akan dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi di dalam level sosial masyarakat (seperti pada beberapa karya Buyantueva yang menjelaskan bahwa gerakan aktivisme di Masyarakat berperan besar dalam akseptansi LGBTQIA+ di Rusia), yang kemudian menjadi suatu titik tumpuan dalam penelitian ini untuk membuktikan bahwa adanya agenda politik LGBTQIA+ tidak hanya berangkat dari satu level interaksi saja, melainkan terdapat pola interaksi lain yang menyebabkan dinamika akseptansi LGBTQIA+ sebagai suatu hukum di dalam negara.

Adapun penelitian sebelumnya dengan judul *Cultural and geopolitical conflicts between the West and Russia: Western NGOs and LGBTQIA+ activism* yang ditulis oleh Radzhana Buyantueva menjelaskan mengenai interaksi antara *NGOs* negara-negara barat dan aktivis LGBTQIA+ Rusia dalam agenda penyebar luasan akseptansi LGBTQIA+. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penyebaran paham liberal di Rusia dibantu oleh badan LSM barat, yang mempromosikan “kebebasan” tersebut di level masyarakat, yang salah satu agendanya adalah promosi mengenai LGBT dan akseptansinya di masyarakat.

BAB III

METODOLOGI

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini selanjutnya akan membahas mengenai keterkaitan dan hubungan diplomasi antara AS dan Rusia melalui agenda politik LGBTQIA+ yang dilakukan melalui metode kualitatif. Adapun metode kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak menggunakan data statistik dalam proses penemuannya (Salim dan Syahrudin, 2012). Kedepannya penelitian ini akan menganalisis hubungan diplomasi antara AS dan Rusia tanpa melakukan atau menggunakan perhitungan data statistik. Penemuan dalam penelitian ini hanya akan diperoleh dari literatur kredibel (seperti jurnal, dan buku-buku terkait penelitian) serta berita-berita faktual yang telah tersedia secara *online*.

Unit analisa dari studi ini adalah Internasionalisasi LGBTQIA+ AS yang merupakan bagian dari Sistem Internasional, dimana mengingat bahwa hukum LGBTQIA+ ini merupakan salah satu alat diplomasi AS yang telah dinormalisasikan dan mendapatkan akseptansi di berbagai negara. Sedangkan untuk unit eksplanasi dari penelitian ini adalah hubungan diplomasi antara Rusia dan AS, yang termasuk ke dalam kelompok Sistem Internasional. Kedua negara ini memiliki hubungan yang selalu fluktuatif dan tentunya sangat menarik untuk dikaji. Kedua negara sama-sama memiliki pengaruh ideologi yang sangat signifikan, dan tentunya berdampak kepada negara-negara lainnya. . Karena unit analisis (Sistem Internasional) dari studi ini sama dengan unit eksplanasinya, maka studi ini bersifat korelasional (Mas'ood, 1990).

B. Sumber Penelitian

Sumber utama dalam penelitian ini adalah berita-berita internasional yang berkaitan dengan interaksi antara AS dan Rusia. selain itu, adapun jurnal-jurnal atau publikasi ilmiah yang kredibel juga menjadi sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui analisis literatur-literatur yang berkaitan dengan hubungan diplomatik antara AS dan Rusia, terutama di dalam agenda atau yang berkaitan dengan politik LGBTQIA+ antar kedua negara. Beberapa sumber yang berupa linimasa waktu peristiwa juga berperan signifikan dalam menelaah perkembangan hubungan diplomatik antara kedua negara. Selain linimasa, beberapa penelitian terkait sikap dan perilaku negara dalam agenda politik LGBTQIA+ juga membantu penemuan dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Setelah data yang terdapat di dalam penelitian ini dikumpulkan, maka data akan dianalisa melalui relevansi teori yang digunakan di dalam penelitian ini (*Norm Life Cycle* dan *LGBTQIA+ Politics*). Secara singkat, teori dan konsep tersebut akan berpengaruh terhadap penemuan dalam penelitian ini, dimana adanya norma (berupa politik LGBTQIA+) tumbuh dan berkembang di masyarakat berdasarkan fase akseptansi tertentu, hingga dipaksakan akseptansinya di dalam suatu negara. Analisa data dalam penelitian ini turut dilakukan dengan mengikuti linimasa waktu perkembangan hubungan antara kedua negara, mulai dari penyebaran tahap awal, hingga respons dari masing-masing negara.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kontekstualisasi Gender dan Seksualitas dalam LGBTQIA+

Gender memiliki definisi yang beragam dan sangat kompleks, mengingat sifat dari gender yang akan selalu berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Secara umum, gender dapat didefinisikan sebagai bentuk dari perilaku, peran, aktivitas, serta atribut yang melekat baik pada pria, wanita, atau identitas lainnya di ranah sosial. Gender memiliki definisi yang berbeda dengan *sex* atau jenis kelamin, dimana jenis kelamin sendiri merupakan identitas yang melekat sejak lahir, sedangkan gender merupakan suatu konstruksi sosial masyarakat (WHO, 2012). Gender dalam mayoritas

kelompok sosial dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu laki-laki (*male*) dan Perempuan (*female*), atau dapat didefinisikan sebagai *gender binary*. Karena masyarakat kontemporer AS masih bertumpu pada asumsi bahwa hanya ada dua jenis kelamin yang eksklusif yaitu perempuan dan laki-laki, istilah *binary* menjadi suatu hal yang dapat “diterima oleh akal sehat” dalam budaya AS yang juga diikuti oleh negara-negara lainnya (Gosselin & Bombardier, 2019). Namun, seiring dengan perkembangannya, terdapat sekelompok masyarakat yang mengidentifikasi diri mereka sebagai individu yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi *gender binary*, oleh karena itu muncullah istilah kelompok *non-binary*. Istilah *non-binary* sendiri muncul karena berbagai faktor, dimana salah satunya adalah diagnosa *gender dysphoria*, yang merupakan salah satu istilah diagnostik yang mengacu pada ketidaknyamanan atau tekanan terus menerus yang terjadi Ketika jenis kelamin yang dimiliki seorang individu saat lahir tidak sesuai dengan pengalaman yang dirasakan oleh individu tersebut (Gosselin & Bombardier, 2019). *Gender dysphoria* ini kemudian juga menimbulkan suatu fenomena yaitu *transgender*, yang menjadi tindakan perubahan gender dari seorang individu yang merasa tidak cocok dengan jenis kelamin tradisionalnya.

Selain dari identitas gender, preferensi seksual juga menjadi salah satu klasifikasi individu yang berada di bawah payung agenda LGBTQIA+. Secara umum, preferensi seksual didefinisikan sebagai ketertarikan secara romantis, baik terhadap orang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda (*heterosexual*), jenis kelamin atau gender yang sama (*homosexual/gay/lesbian*) atau ketertarikan terhadap kedua jenis kelamin atau gender lainnya (*bisexual*) (Eldridge, 2022).

Perkembangan dari gender dan seksualitas yang dicap sebagai suatu hal yang tidak masuk akal menimbulkan suatu fenomena yang disebut sebagai *homophobia* di masyarakat. Perilaku *homophobia* ini menimbulkan berbagai macam diskriminasi yang ditujukan terhadap kelompok LGBTQIA+. Tidak begitu banyak studi yang membahas mengenai asal mula perilaku *homophobia* ini secara sosial, sering kali dijelaskan bahwa hal ini merupakan suatu ekspresi atau sikap negatif suatu individu terhadap kelompok yang dianggap “minoritas”, dimana sikap negatif itu sendiri berasal dari bentuk-bentuk kepercayaan “tradisional” seperti agama. Kemudian tekanan-tekanan ini membentuk suatu dorongan dari pergeseran *political movement* yang bertujuan untuk menghentikan diskriminasi terhadap kelompok minoritas (kelompok LGBTQIA+), serta memunculkan adanya klaim dan identitas politik yang positif di Barat. Salah satu contoh atau bukti dari adanya *political shift* dalam diskursus LGBTQIA+ ini adalah penerimaan terhadap kelompok tersebut berupa pembentukan *legal law* yang memberikan proteksi terhadap kelompok LGBTQIA+ baik secara identitas gender maupun preferensi seksual dari seorang individu (Rahman, 2019). Saat ini, individu *non-binary* serta kelompok *transgender* memiliki perlindungan hukum tersendiri di berbagai negara,

terutama AS (Levin, 2017), sedangkan individu atau kelompok *gay* telah diberikan legalitas oleh AS sejak tahun 1961 di Illinois (Harrington, 2010).

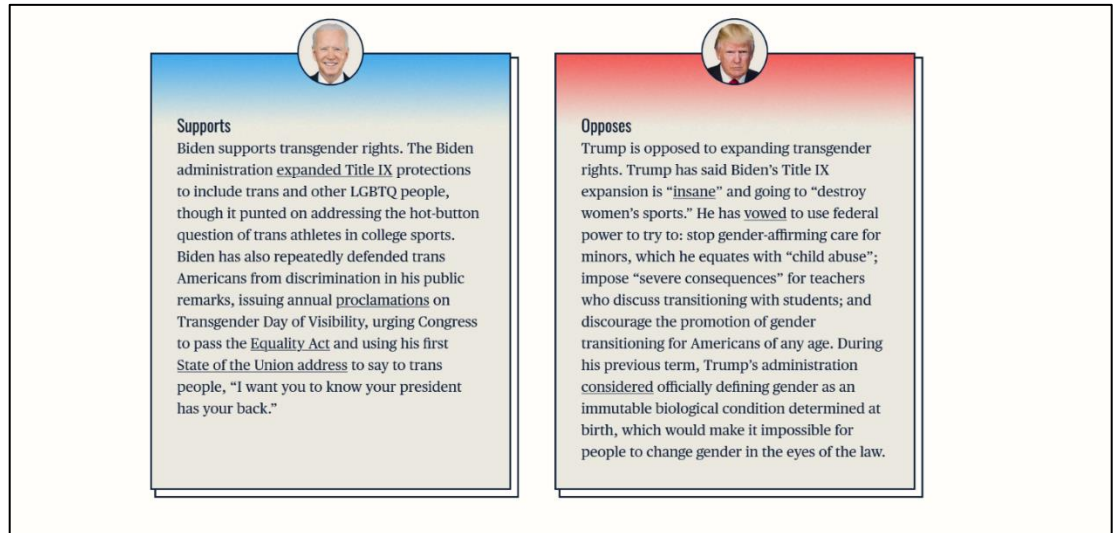
B. LGBTQIA+ Sebagai Agenda Politik AS.

Hak Asasi Manusia merupakan salah satu diskursus dan ciri khas yang melekat pada wacana politik liberal Barat, yang dapat memberikan hak-hak politik terhadap subjek-subjek tertentu yang telah diakui oleh suatu komunitas politik (seperti negara) sebagai manusia. Dalam konteks ini, “manusia” awalnya dapat didefinisikan sebagai laki-laki borjuis berkulit putih, beragama Kristen, dan heteroseksual. Namun seiring dengan perkembangannya, definisi ini pun diperluas hingga mencakup beberapa kategori lainnya seperti perempuan, anak-anak, agama, etnis dan ras minoritas. Perluasan ini dilakukan karena kelompok-kelompok tersebut dianggap ‘berbeda’ dengan wacana politik yang telah dibentuk oleh negara-negara Barat, dimana mereka memiliki perjuangan tersendiri untuk pada akhirnya dapat diberikan definisi sebagai “manusia” dalam hak asasi manusia itu sendiri. Perjuangan ini juga menjadi simbol perjuangan bagi kelompok *gay*, *lesbian*, *biseksual*, *transgender*, *queer*, *interseksual* dan *aseksual* (LGBTQIA+) (Weber, 2016). Dekriminalisasi kelompok LGBTQIA+ AS dimulai pada tahun 1961 di Illinois (Harrington, 2010). Dekriminalisasi ini selanjutnya berkembang menjadi hukum-hukum lainnya seperti proteksi, jaminan medikasi, hingga edukasi di beberapa jenjang pendidikan (Epstein, 2024).

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pengaruh kelompok LGBTQIA+ selaku kelompok termarginalisasi berada dalam skala yang besar dan tidak dapat dibendung. Dukungan dari publik terhadap kelompok LGBTQIA+ secara politik meningkat secara drastis dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan survei, pada tahun 2004, hanya 31 persen orang AS yang mendukung pernikahan sesama jenis, dan pada tahun 2014 hampir seluruh penduduk AS memberikan dukungan penuh terhadap pasangan sesama jenis. Peningkatan ini tidak hanya ada dalam hal akseptansi dari kelompok mayoritas atau non-LGBTQIA+ (yang dapat disebut sebagai *ally*), namun juga terdapat pada individu dalam kelompok tersebut. Peningkatan signifikan terdapat pada individu *gay* secara signifikan terjadi bersamaan dengan peningkatan akseptansi kelompok LGBTQIA+ di tengah-tengah masyarakat (Bishin et al., 2021).

Selain peningkatan yang terjadi di ranah sosial masyarakat, peningkatan akseptansi dan keterbukaan ini juga terjadi di ranah politik dan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya keterlibatan individu LGBTQIA+ dalam ranah politik. Jumlah pejabat terpilih LGBTQIA+ meningkat sebanyak 6% pada tahun 2021. Peningkatan ini terjadi sejak tahun 2017, dimana hal ini ditandai dengan banyaknya keikutsertaan individual LGBTQIA+ terutama individu

gay dan transgender ke dalam jajaran politik pemerintahan AS (Moreau, 2022). Eksklusifitas peningkatan normalisasi dan legalisasi politik LGBTQIA+ terjadi pada masa pemerintahan presiden Joe Biden. Jika dibandingkan dengan masa pemerintahan presiden Trump, kebijakan domestik terkait



LGBTQIA+, kebijakan yang dimiliki Joe Biden dapat dikatakan lebih fleksibel dan lebih terbuka, meskipun keduanya telah memberikan akseptansi terhadap kelompok LGBTQIA+, kebijakan yang dimiliki Trump cenderung memilih untuk mendefinisikan gender sebagai kondisi biologis yang tidak dapat diubah dan ditentukan pada saat lahir, sedangkan Biden memberikan proteksi yang ketat terhadap kelompok LGBTQIA+ (Allen et al., 2024).

Gambar 2. Perbandingan kebijakan terhadap kelompok LGBTQIA+ pada masa pemerintahan Trump dan Joe Biden

Selain legalitas dalam bentuk kebijakan, legalitas juga diberikan dalam bentuk pembentukan organisasi pemerintahan serta berbagai NGO di AS. Pembentukan organisasi ini merupakan salah satu bentuk pertumbuhan akseptansi kelompok LGBTQIA+ di AS secara signifikan. Organisasi-organisasi tersebut bekerja di multi sektor seperti kesehatan, perlindungan dalam media dan *entertainment* (GLAAD), edukasi (GLSEN atau *Gay, Lesbian & Straight Education Network*) serta sektor-sektor lainnya. Selain NGO, AS juga membentuk beberapa organisasi pemerintahan yang berfokus pada isu-isu terkait LGBTQIA+ seperti *Global Equality Fund*, dan GLIFAA (*Gays and Lesbians in Foreign Affairs Agencies*).

Posisi Joe Biden sebagai pemimpin negara AS memperkuat status akseptansi bahkan normalisasi kelompok LGBTQIA+ dalam ranah domestik hingga internasional. *Memorandum on* **Summer:** Allen et al., (2024) *Protecting Rights of LGBTQ People Abroad* yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2021, menjadi salah satu titik berat dari seruan untuk memberikan akseptansi terhadap kelompok LGBTQIA+ secara

Internasional, dan menjadi penanda bahwa akseptansi LGBTQIA+ menjadi salah satu hal yang mutlak untuk dilakukan, baik secara domestik maupun Internasional (The White House, 2021). Memorandum ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu momentum persinggungan dalam komunikasi politik LGBTQIA+ antar Amerika Serikat dan Rusia.

Penyebaran akseptansi LGBTQIA+ ini kemudian turut dibantu dengan adanya kelompok-kelompok seperti NGO, yang turut mempromosikan agenda akseptansi LGBTQIA+ secara global oleh AS. Politik LGBTQIA+ sendiri didukung oleh LSM-LSM barat (seperti GLAAD, GLESN dan organisasi-organisasi lainnya) yang turut dibantu oleh adanya gerakan LGBTQIA+ lokal membentuk pola politik transnasional yang majemuk, kemudian menciptakan suatu bentuk aturan baru mengenai cara negara mengatur dan melindungi negaranya. Politik LGBTQIA+ milik AS selanjutnya mempromosikan bahwa individu-individu yang termasuk ke dalam golongan LGBTQIA+ bukanlah minoritas yang hina, namun sebagai pembawa hak asasi manusia dengan harkat dan martabat yang harus dihargai, dan sebagai salah satu simbolisasi dari “kebebasan berekspresi” (Thiel, 2014).

Terdapat beberapa motif yang kemudian menyebabkan mengapa Joe Biden meningkatkan *awareness* terhadap kelompok LGBTQIA+. Beberapa diantaranya adalah adanya kecenderungan perdebatan publik terhadap isu akseptansi LGBTQIA+ serta adanya motif kultural dan politik dalam peningkatan hegemoni AS.

a. Perdebatan publik dalam akseptansi LGBTQIA+

Konservatifisme merupakan salah satu penghambat akseptansi LGBTQIA+ secara publik. Beberapa kelompok LGBTQIA di beberapa negara (terutama Rusia) masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas masyarakat. Terdapat beberapa alasan yang dapat memberikan justifikasi terhadap penolakan kelompok LGBTQIA+, beberapa di antaranya adalah keterikatan ajaran agama dan norma dalam kebijakan, kondisi ekonomi di suatu negara, dan demokrasi (Adamczyk, 2019). kelompok LGBTQIA+ masih menghadapi hambatan dan diskriminasi di berbagai bidang seperti pekerjaan, perumahan, akomodasi publik, dan lainnya (Medina et al., 2021).

Selain tekanan sosial terhadap kelompok LGBTQIA+, pertentangan akseptansi juga terdapat di beberapa negara secara legal, dalam konteks ini, diskriminasi terhadap kelompok LGBTQIA+ menjadi suatu hal yang diperbolehkan atas asas ajaran agama, atau berdasarkan pada kepercayaan yang dianut mayoritas di negara tersebut, dan menjadi ketetapan hukum di negara tersebut (Davidson, 2022). Diskriminasi semacam ini pun membuktikan bahwa ancaman yang diterima oleh kelompok LGBTQIA+ terdapat pada level yang luar biasa. Adanya diskriminasi yang terus menerus terjadi ini kemudian memberikan motivasi

pemerintah AS untuk meningkatkan keamanan bagi kelompok LGBTQIA+ secara domestik hingga internasional.

b. Motif Kultural dan Politik Dalam Hegemoni Amerika Serikat

AS selaku pemimpin dari tatanan liberal internasional yang muncul setelah Perang Dingin pada awalnya membantu menyebarkan nilai-nilai liberal, termasuk hak-hak LGBTQIA+, melalui jaringan aktivis transnasional dan lembaga-lembaga yang didukung oleh Barat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penurunan hegemoni AS terjadi bersamaan dengan penolakan terhadap hak-hak LGBTQIA+ di beberapa negara. Ketika kepemimpinan global AS terurai, beberapa jaringan transnasional yang tidak liberal dan sayap kanan turut menantang norma-norma liberal, termasuk hak-hak LGBTQIA+ (Cooley & Nexon, 2020).

Adanya penurunan pengaruh hegemoni ini kemudian mengubah arah “promosi” politik AS, dimana akseptansi LGBTQIA+ menjadi salah satu agenda utama dalam promosi tersebut. Secara historis, bahasa dan diskursus dalam masyarakat memegang peranan besar dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap kelompok LGBTQIA+. AS pada akhirnya melakukan promosi akseptansi melalui media-media populer. Representasi kelompok LGBTQ di media-media populer AS, khususnya film, music atau *series* remaja, telah menjadi situs negosiasi ideologis. Representasi dalam media populer mencerminkan perjuangan hegemonik yang sedang berlangsung atas norma-norma dan nilai-nilai sosial (Macrae, 2018).

C. Rusia dan Agenda Politik LGBTQIA+

Beragamnya orientasi seksual masyarakat yang terus-menerus berkembang menjadikan semakin besarnya akseptansi kelompok ini di berbagai negara. Negara-negara liberal seperti AS, dan beberapa negara liberal lainnya juga turut melegalkan perilaku LGBTQIA+ di negaranya secara hukum, dan turut menjadikan LGBTQIA+ sebagai salah satu kepentingan politik negaranya. Tetapi, akseptansi kelompok LGBTQIA+ menjadi suatu hal yang mustahil untuk dicapai di Rusia. Eksistensi hukum atau undang-undang “*gay propaganda*” yang sudah diresmikan dan tentunya diterapkan sejak tahun 2013 di Rusia menjadi bukti nyata akan adanya krisis akseptansi kelompok LGBTQIA+ di negara tersebut (Thoreson, 2015). Secara historis, Rusia dikenal dengan perbedaan arah ideologi politik dengan negara-negara liberal seperti Amerika Serikat. Undang-undang “*gay propaganda*” milik Rusia kemudian menjadi contoh dari homophobia dalam aspek politik, dimana negara membuat kelompok-kelompok minoritas yang kegiatan atau kepercayaannya berasaskan pada gender dan seksualitas sebagai target untuk membuat suatu keuntungan politik bagi negaranya,

yang dalam hal ini ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat global. Dalam tingkat internasional, undang-undang ini kemudian dapat membantu Rusia menjadi juara dalam hal negara yang menjunjung tinggi “*traditional values*” atau nilai-nilai tradisional yang konservatif (Rajvanshi, 2022).

Isu LGBTQIA+ atau homoseksual di Rusia tidak semata-mata menjadi isu *high politics* atau hanya berpengaruh dan dipengaruhi oleh pemerintah di negara saja, melainkan isu ini timbul dan juga berkembang di kalangan masyarakat. Ditinjau dari aspek masyarakat, LGBTQIA+ di Rusia pada dasarnya sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak lama, berkembang dan membentuk sebuah komunitas yang berfungsi untuk memperjuangkan akseptansi dan legalitas LGBTQIA+ di negara tersebut. Evolusi akseptansi dan legalitas LGBTQIA+ di Rusia menjadi suatu hal yang fluktuatif, dilihat dari beberapa kemajuan dan kemunduran akan hukum LGBTQIA+ di Rusia hingga saat ini. Dilihat dari aspek sejarahnya, hukum untuk perilaku homoseksualitas di Rusia telah diterapkan sejak era kebudayaan Slavia Pra-Modern (sekitar tahun 900-1700), dimana hukum ini diterapkan dengan tujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat. Hukum di Rusia terdahulu juga secara jelas memberikan dikte akan seksualitas dari masyarakatnya, dimana hal ini juga sekaligus memberikan pengelompokan peran wanita dan pria di masyarakat umum. Hal yang menarik dari perkembangan hukum anti-LGBTQIA+ Rusia adalah bagaimana Rusia menjelaskan bahwa hukuman hanya berlaku bagi perilaku *gay* atau homo, sedangkan perilaku lesbian hanya dianggap sebagai suatu penyakit yang bisa diobati (Batueva & Đorđević, 2017).

Kebebasan LGBTQIA+ juga pernah diberlakukan di Russia pada saat berdirinya Uni Soviet, dimana hukum-hukum anti perilaku homoseksual serta hukum-hukum yang terkait dengan seksualitas masyarakat dihapuskan, dan diubah menjadi dilegalkan. Meskipun dilegalkan, hukum terkait kebebasan LGBTQIA+ ini kemudian tidak mendapatkan respons yang baik dari masyarakat, dimana beberapa kelompok masyarakat masih melakukan diskriminasi terhadap kelompok LGBTQIA+, dan sering kali menolak untuk mempekerjakan para pria *gay*, atau para pria yang memiliki sifat feminim (cenderung ditandai dengan cara berpakaian, atau perilaku) (Khoroshilova, 2017).

Tepat pada masa pemerintahan partai komunis yang dipimpin oleh Gorbachev, Rusia menjadi negara yang terbuka, ditandai dengan kampanye kebijakan yang diberi nama *glasnost and perestroika*. Dua aspek yang menjadi fokus dari kebijakan ini adalah keterbukaan, baik dari aspek informasi dunia luar (*glasnost*) serta aspek restrukturisasi ekonomi dan sistem politik (*perestroika*), dimana kedua istilah ini kemudian dianggap dapat membuka peluang demokratisasi Uni Soviet

sekaligus membuka peluang untuk restrukturisasi ekonomi dan sistem politik komunis di negara tersebut (Waxman, 2022). Euforia akseptansi LGBTQIA+ (terutama hubungan homoseksual) kemudian tidak bertahan lama. Setelah berakhirnya pemerintahan partai komunis di Rusia, dan terbentuknya pemerintahan di bawah rezim Stalin, hubungan homoseksualitas dan hal-hal terkait kembali menjadi suatu hal yang dianggap buruk, dan bahkan menjadi tindakan kriminal di berbagai lapisan masyarakat. Setelah tahun 1934, hukum anti LGBTQIA+ dan perilaku homoseksual kembali diterapkan, dan tentunya perilaku homoseksual menjadi suatu tindakan kriminal di seluruh penjuru Uni Soviet pada saat itu (Engelstein, 1995).

Hingga saat ini, Putin terus-menerus memberikan Internasionalisasi atau penambahan hukum baru mengenai kriminalisasi LGBTQIA+ di Rusia. Beberapa Internasionalisasi anti-LGBTQIA+ di bawah pemerintahan Putin antara lain;

Pertama, dalam rencana Internasionalisasi anti-LGBTQIA+ yang telah diinisiasi sejak tahun 2014, Rusia menyatakan bahwa perilaku homoseksual merupakan hal yang menyimpang dan menjadi suatu tindakan kriminal di Rusia. Hukum anti-LGBTQIA+ atau disebut juga sebagai hukum melawan propaganda hubungan seksual non-tradisional yang kemudian sekaligus menjadi titik berat terjadinya perang *International Culture over LGBTQIA+ rights* (Picq & Thiel, 2015). Internasionalisasi ini ditujukan untuk melindungi anak-anak di bawah umur dari pengaruh-pengaruh kelompok LGBTQIA+ yang dianggap berbahaya (Davis, 2023).

Kedua, pada tahun 2022, Rusia memberikan penekanan berupa pembatasan yang ditujukan pada media-media baik edukasi maupun hiburan seperti film, buku, teater, pentas seni, dan hal-hal semacamnya yang mengandung unsur-unsur “*gay propaganda*”. Putin memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih berat bagi siapa saja yang berusaha menyebarkan luaskan ajaran atau informasi terkait LGBT secara privat atau publik, terutama bagi anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun, dan secara tidak langsung juga menunjukan hukum tersebut terhadap hampir keseluruhan masyarakat Rusia. Pada tahap ini, dapat dipahami bahwa penyebaran media atau informasi yang mengandung unsur-unsur homoseksualitas atau *gay propaganda* akan dianggap sama dengan penyebaran media pornografi atau pedofilia (AP News, 2022).

Kemudian, pada tahun 2023, Rusia menetapkan kelompok LGBTQIA+ sebagai kelompok ekstremis yang dapat mengancam kedaulatan negara. Hukum ini ditetapkan untuk membangun citra politik yang lebih baik, serta memberikan proteksi penuh untuk masyarakat secara umum terutama anak-anak (Burga, 2023). Rusia akan memberikan sanksi bagi siapa saja yang tergabung dalam kelompok LGBTQIA+ atau setiap individu yang memberi dukungan terhadap kelompok

LGBTQIA+. Demonisasi kelompok LGBTQIA+ ini masih terjadi hingga saat ini dengan hukuman minimal 15 hari di penjara bagi individu yang terbukti mendukung kelompok LGBTQIA+.

Ada beberapa motif yang melatar belakangi hukum anti-LGBTQIA+ yang terus-menerus diperbaharui dan diperketat oleh pemerintah Rusia bahkan hingga saat ini, di samping dari pengaruh tensi perang dingin. Beberapa diantaranya adalah adanya ideologi konservatif dari sistem pemerintahan Rusia, serta peran ajaran agama Kristen Ortodox yang sangat kental dalam pembentukan hukum anti-LGBTQIA+ di Rusia.

a. Ideologi konservatif dalam pemerintahan Rusia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum anti-LGBTQIA+ ini telah dijalankan semenjak pemerintahan Kremlin pada tahun 1934. Hal ini didorong oleh adanya nilai-nilai tradisional Rusia yang sangat kental dalam membentuk suatu hukum terkait dengan gender dan identitas di Rusia. Rezim Putin telah memberikan eksklusifitas khusus terhadap nilai-nilai tradisional Rusia, dimana Putin memperlakukan nilai tersebut sebagai *core* dalam penegakan hukum serta berbagai urusan internasional Rusia bahkan hingga saat ini (Edenborg, 2023). Pada tahun 2021, dalam forum *The 18th Annual Meeting of the Valdai Discussion Club*, dengan tema “*Global Shake-up in the 21st Century: The Individual, Values and the State*” Putin memberikan penjelasan terbaru mengenai peran dari nilai-nilai tradisional dalam politik domestik serta Internasional Rusia. Ia memberikan karakterisasi bahwa masa kini sebagai suatu krisis dari pendekatan dan prinsip yang dapat menentukan eksistensi dari umat manusia (Stepanova, 2022).

Kemudian adanya dorongan dari kondisi geopolitik serta krisis COVID-19 pada saat itu juga menyebabkan rumitnya upaya untuk mempertahankan moral atau nilai-nilai tradisional bagi manusia. Hal ini juga menjadi salah satu pertanda akan adanya “*world-wide battle for values*” yang didefinisikan sebagai krisis oleh Putin yang dapat memengaruhi sisi “liberal” dan “tradisionalis”. Selain itu, Putin menjelaskan bahwa krisis ini menyebabkan perjuangan untuk nilai-nilai menjadi suatu hal yang sangat penting, namun di sisi lain Putin tidak dapat memaksakan nilai-nilai apa pun terhadap siapa pun, karena Putin menilai bahwa nilai tersebut merupakan produk unik dari perkembangan budaya dan Sejarah bangsa tertentu, dan bagi Putin, ketergantungan pada nilai-nilai spiritual Rusia, tradisi sejarah, dan budaya bangsanya yang multietnik merupakan ciri “konservatisme yang sehat” (Lukyanov, 2021).

Putin memandang nilai-nilai liberal yang dimiliki oleh AS dapat mengancam kedaulatan negara Rusia, serta memberikan pengaruh terhadap opini publik di berbagai sektor. Selanjutnya, karena berbagai alasan, Rusia merasa bahwa AS adalah lawan yang sepadan, sehingga dalam penegakkan hukumnya, Rusia selalu berpaku pada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang telah dikeluarkan oleh AS (Alfarauqi, 2017). Adanya hegemoni AS yang sangat kuat kemudian memberikan dorongan terhadap Putin untuk memperkuat nilai-nilai tradisional Rusia.

Menurut *Report on the state of civil society in the Russian Federation* pada tahun 2022, terdapat beberapa poin yang menjadi kunci utama dalam nilai-nilai tradisional Rusia, diantaranya adalah *Preservation and Strengthening of traditional spiritual and moral values, Interethnic and religious diversity and unity, Family and childhood protection, Patriotic education, dan Protection and preservation of national treasure and historical and cultural heritage* (Novoderezhkin, 2022).

1. *Preservation and Strengthening of traditional spiritual and moral values*

Topik pelestarian dan perlindungan nilai-nilai Rusia mulai berkembang secara berkelanjutan pada akhir dekade awal tahun 2000-an. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya ekspansi dari sistem dan nilai-nilai barat ke Rusia yang ditunjukkan dengan adanya pembentukan budaya *mass consumption* di Rusia. Berdasarkan pendapat para ahli, situasi tersebut dapat dikaitkan dengan *Lost Generation*, konflik identitas suatu generasi yang semakin meningkat, dan pertentangan nilai di dalam masyarakat Rusia (Novoderezhkin, 2022).

2. *Interethnic and religious diversity and unity*

Nilai agama menjadi suatu hal yang sangat kental dalam tata aturan dan kebijakan Rusia. Saat ini, asosiasi etnokultural dan agama, organisasi antar etnis, dan NGO-NGO terkait secara aktif berinteraksi dengan negara dalam berbagai *key national task*.

Di antara organisasi dan asosiasi publik tersebut, seperti Majelis Rakyat Rusia, Eurasia, perwakilan masyarakat adat, Gerakan Masyarakat Seluruh Rusia “Forum Senezh”, pusat-pusat budaya Rusia, etnovillages, rumah-rumah etnis dan pusat-pusat etnokultural di berbagai daerah di Rusia, serta sebagian besar organisasi nonpemerintah lain juga turut menangani masalah kebijakan nasional negara dan harmonisasi hubungan antar etnis (Novoderezhkin, 2022).

3. *Family and childhood protection*

Nilai-nilai keluarga serta perlindungan anak-anak menjadi salah satu aspek penting dalam nilai-nilai tradisional Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia menghadapi masalah yang cukup krusial di bidang demografi, dimana hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk yang rendah karena berbagai faktor seperti pandemi covid, Tingkat kelahiran yang menurun serta faktor-faktor lainnya.

Federasi Rusia telah melakukan berbagai upaya yang komprehensif dengan skala yang besar dalam *key areas* dalam perlindungan anak dan keluarga, dimana hal ini bertujuan untuk mendorong angka kelahiran dan pengasuhan anak, sekaligus menjamin perlindungan mereka. Vladimir Putin menekankan bahwa perlu untuk mengembalikan tradisi historis keluarga besar, yang harus ditetapkan sebagai standar dan orientasi nilai bagi masyarakat dan prioritas terpenting bagi negara.

Saat ini, negara memberikan dukungan bagi perempuan selama kehamilan, persalinan dan kemungkinan merawat anak-anak jika sakit, membantu dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak dan menciptakan peluang untuk mengatur rekreasi mereka (Novoderezhkin, 2022). Selain untuk mendorong angka kelahiran, proteksi terhadap anak-anak dan keluarga juga ditujukan untuk melindungi kemurnian nilai tradisional dan menghindari adanya kemungkinan masuknya pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan, dimana dalam konteks ini adalah pengaruh-pengaruh ideologi barat seperti LGBTQIA+. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai Internasionalisasi terkait nilai-nilai dari ideologi barat, bahkan hingga menyeluruh (aturan-aturan terkait konsumsi media hiburan, berita, serta berbagai aturan lainnya yang secara langsung dikaitkan dengan penyebaran *gay propaganda*) (Davis, 2023).

4. *Patriotic education*

Adanya permintaan publik yang luas untuk pendidikan patriotik bagi anak-anak dan remaja telah terbentuk di negara Rusia selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, pembentukan dari *New Russian Movement of Children and Youth* yang didirikan oleh 26 asosiasi *public-state* dan asosiasi anak-anak dan remaja menjadi salah satu peristiwa penting dalam sektor ini (Novoderezhkin, 2022). Saat

ini, pendidikan patriotik menjadi salah satu alat utama yang ditujukan untuk pengembangan pendidikan di lembaga pendidikan umum dan kejuruan.

5. ***Protection and preservation of national treasure and historical and cultural heritage***

Pemerintah Rusia percaya bahwa salah satu tugas penting dari setiap negara dan masyarakat yang maju adalah pelestarian warisan sejarah dan budaya sebagai salah satu prinsip yang dapat menjamin keamanan dan kedaulatan nasional dari suatu negara. Jika budaya-budaya tersebut hilang, maka akan hilang juga makna dan tujuan Pembangunan dari suatu negara.

Warisan sejarah dan budaya, sebagai penyimpan memori sejarah, secara langsung turut serta membentuk kepribadian setiap manusia dan identitas kewarganegaraannya. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya berskala besar telah dilakukan di Rusia untuk mengesahkan berbagai inisiatif publik yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian ingatan sejarah. Kewajiban negara untuk melindungi kebenaran sejarahnya dan tidak dapatnya meremehkan pentingnya prestasi rakyat dalam mempertahankan Tanah Air diabadikan dalam Konstitusi Federasi Rusia. Versi baru Strategi Keamanan Nasional yang diadopsi pada tahun 2021 mendefinisikan penguatan nilai-nilai spiritual dan moral tradisional Rusia serta pelestarian warisan budaya dan sejarah rakyat Rusia menjadi kepentingan nasional pada saat ini.

Nilai-nilai tradisional Rusia sendiri didasarkan oleh adanya prinsip konservatif tentang kebenaran yang statis atau tidak dapat diubah. Nilai-nilai ini kemudian ditetapkan untuk dibagikan oleh semua orang, di mana saja dan kapan saja, yang berarti tidak ada spesifikasi tertentu yang dapat dikhususkan. Selain itu, karakternya yang abadi dan sakral berarti bahwa tidak ada upaya apa pun yang ditujukan untuk menerapkannya ke dalam suatu praktik tertentu di dalam negara, karena mereka dijamin oleh kehendak Tuhan (Stepanova, 2022).

b. **Peran ajaran agama Kristen Ortodox dalam pembentukan hukum anti-LGBTQIA+ di Rusia**

Dalam praktiknya, tradisi spiritual yang terjadi dalam ajaran Kristen ortodoks didasarkan pada hubungan antara anggota yang dikeramatkan dengan bapa/bapa pengakuannya, yang dapat memberikan atau menolak akses-akses terhadap sakramen-sakramen. Akibatnya, akses sakramen bisa jadi lebih longgar, dan kebijakan-kebijakannya

tidak selalu ditegakkan dengan praktik yang konsisten dari satu wilayah ke wilayah lainnya (HRC, 2021). Ajaran Kristen Ortodoks (terutama *eastern orthodoxy*) adalah gereja yang konservatif secara sosial dengan ritual yang rumit serta hirarki yang ketat. Sebagian besar gereja Ortodoks diorganisir berdasarkan garis nasional, dengan beberapa gereja lainnya (gereja independen) yang memilih doktrin dan praktik kuno dalam basis ajarannya. Seperti badan-badan gereja internasional lainnya, Kristen Ortodoks telah menghadapi seruan untuk memberikan akseptansi terhadap kelompok LGBTQ+. meskipun tidak memiliki otoritas doktrinal tunggal seperti seorang paus, gereja Ortodoks telah bersatu dalam menentang pengakuan terhadap hubungan sesama jenis baik di dalam ritus-ritus mereka sendiri maupun di ranah sipil. Opini publik di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Ortodoks pun sebagian besar menentangnya (Smith & Litvinova, 2024).

Ajaran agama Kristen ortodoks memiliki peranan penting dalam pembentukan hukum dan kebijakan Rusia. Kebijakan mengenai kriminalisasi atau demonisasi kelompok LGBTQIA+ di Rusia sepenuhnya didukung oleh adanya peran ajaran agama Kristen Ortodox (Kislitsyna, 2020b). Dalam ajaran agama ortodoks sendiri mengajarkan bahwa hubungan yang terjalin antar dua individu sesama jenis merupakan suatu hal yang dilarang dan berdosa untuk dilakukan. Selain itu, ajaran agama ini juga berpendapat bahwa adanya hubungan seksual sesama jenis di tengah-tengah Masyarakat merupakan salah satu tanda dari hari akhir. Menurut *Russian Public Opinion Research Center*, pada tahun 2019, terdapat 63% penduduk Rusia yang menganut agama Kristen Ortodoks, dan mencapai 74% dalam populasi masyarakat yang berusia di atas 60 tahun. Mengingat adanya pengaruh yang kuat dari ajaran Kristen Ortodoks di mayoritas masyarakatnya, anggota Parlemen Rusia kemudian melobi *Russian Orthodox Church* untuk memberikan dukungan dalam pembuatan undang-undang terkait *gay propaganda* (Kislitsyna, 2020a).

c. ***Scope of Interest* Rusia dalam agenda politik LGBTQIA+ secara Internasional**

Pemerintah Rusia membuat agenda LGBTQIA+ sebagai suatu hal yang krusial terutama dalam hal komunikasi politik ideologi melawan liberalisme Amerika Serikat. Terdapat beberapa alasan mengapa Rusia tidak ingin menyetujui atau melaksanakan seruan untuk akseptansi kelompok LGBTQIA+ di negaranya, di samping dari mempertahankan nilai-nilai tradisional serta keagamaan Rusia. Rusia telah mengambil sikap yang semakin tidak bersahabat terhadap hak-hak LGBTQIA+ dalam beberapa tahun terakhir, dengan menerapkan undang-undang dan kebijakan yang mendiskriminasi dan memarginalkan individu LGBTQIA+. Terdapat beberapa justifikasi yang menjadi klaim Rusia dalam

menerapkan hukum-hukum tersebut, dan berupaya untuk menerapkannya secara Internasional, salah satunya dengan memberikan klaim bahwa akseptansi LGBTQIA+ merupakan bentuk pemaksaan nilai-nilai “Barat”, bentuk campur tangan asing dalam pemerintahan Rusia, serta memberikan “proteksi” akan nilai-nilai tradisional terhadap negara-negara pecahan Uni Soviet, atau negara-negara yang “telah ditakdirkan untuk bersatu” (de Groot, 2022), seperti Belarus dan Ukraina. Sehingga pada akhirnya, karena meluasnya pengaruh ideologi barat di Ukraina, konflik antara Rusia dan Ukraina pun pecah pada tahun 2022.

Aksi yang dilakukan Putin dalam menjaga nilai-nilai tradisional ini diperkuat dengan beberapa faktor lainnya, seperti ekspansi NATO secara geopolitik, dimana terdapat potensi keanggotaan Ukraina di dalamnya, serta meningkatnya keberpihakan Ukraina pada institusi-institusi Barat, seperti Uni Eropa dan NATO, yang juga dipandang sebagai sebuah kerugian strategis oleh Rusia. Kemudian seruan-seruan anti-LGBTQIA+ dilakukan oleh Rusia merupakan salah satu bentuk promosi dari nilai-nilai tradisional Rusia sebagai lawan dari ideologi barat atau akseptansi dari kelompok LGBTQIA+ di Ukraina, sekaligus menjadi motif atau justifikasi dari invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 (Serhan, 2023). Seruan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kriminalisasi kelompok LGBTQIA+, hingga pemberian label kelompok ekstremis bagi para pendukung atau anggota dari kelompok LGBTQIA+ baik di Rusia, maupun negara-negara lainnya. Hal ini juga menjadi suatu respons dari *speech act* Joe Biden pada tahun 2021 mengenai kriminalisasi negara-negara yang tidak ingin memberikan akseptansi terhadap kelompok LGBTQIA+.

D. Interaksi Rusia dan AS di dalam agenda politik LGBTQIA+

Rangkaian peristiwa yang terjadi mulai dari *speech act* oleh Joe Biden hingga babak baru dari ekspansi kebijakan anti-LGBTQIA+ Rusia telah cukup untuk menunjukkan bagaimana intensitas serta ketegangan iklim politik antar kedua negara dalam agenda politik LGBTQIA+ yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. AS memiliki keinginan untuk mencapai akseptansi LGBTQIA+ secara global, yang secara langsung dideklarasikan oleh Joe Biden dalam *Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex around the world* sekaligus desakan untuk kriminalisasi negara-negara yang melakukan “diskriminasi” terhadap kelompok LGBTQIA+. Dalam konteks ini, dapat ditafsirkan bahwa Joe Biden memberi *highlight* terhadap apa yang dilakukan Rusia terhadap kelompok LGBTQIA+ yang ada di negaranya.

Setelah berakhirnya perang dingin, Russia dan AS masih memiliki intensi untuk mempromosikan sekaligus memberikan proteksi dari ideologi dari masing-masing negara, dimana

Rusia yang dominan dengan paham konservatifnya, serta AS dengan paham liberalnya. Rusia menganggap apa-apa saja yang dihasilkan oleh AS baik secara fisik dan non-fisik, sebagai sebuah ancaman, termasuk paham LGBTQIA+ yang sudah sejak lama dinilai sebagai “produk” barat. Hukum “*anti-gay propaganda*” menjadi salah satu senjata yang digunakan oleh Rusia untuk melawan salah satu ideologi barat yaitu LGBTQIA+. Sejak masa pemerintahan Stalin, setelah berakhirnya rezim partai komunis, Rusia (yang menjadi bagian dari Uni Soviet) kembali menetapkan hukum kriminalisasi homoseksualitas. Hukum ini terus menerus berlanjut dan berkembang, bahkan hingga saat ini. Beberapa waktu belakangan ini, Rusia di bawah pemerintahan Putin, memutuskan untuk memperketat atau mengInternasionalisasi tersebut, dimana hal ini menjadi salah satu bagian dari agenda sosial konservatif Putin (Grove, 2013). Secara langsung, agenda LGBTQIA+ AS memiliki dampak di berbagai aspek di Rusia, terutama pada aspek tensi diplomatik dan juga dampak secara kultural.

a. Tensi Diplomatik antar AS dan Rusia

Meskipun memiliki ideologi yang bertentangan, kedua negara ini masih terikat secara hubungan diplomatik yang ditandai oleh adanya bangunan kedutaan AS di Moscow, Rusia, dan bangunan kedutaan Rusia di Wisconsin Avenue, NW, Washington D.C, AS. Kedua negara juga memiliki berbagai kegiatan diplomatik di berbagai sektor terutama pada sektor *nuclear security*, nonproliferasi, keamanan regional Eropa dan Eurasia, serta perlawanan terhadap gerakan terorisme (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2010). Namun, hingga saat ini, Rusia memberikan label “unfriendly countries” terhadap AS. Daftar “*unfriendly countries*” ini dibuat berdasarkan perlakuan “tidak baik” negara-negara tersebut terhadap Rusia berdasarkan pada urusan diplomatik dan konsulat antar Rusia dan negara-negara tersebut (The Russian Government, 2022).

Setelah adanya deklarasi akseptansi kelompok LGBTQIA+ oleh Joe Biden pada tahun 2021, Rusia memberikan tanggapan yang jauh lebih negatif jika dibandingkan dengan respon-respon sebelumnya. Rusia memberikan pengetatan terhadap eksistensi kelompok LGBTQIA+ di negaranya. Jika sebelumnya Rusia hanya memberikan hukuman ringan terhadap individu-individu yang terkait dengan kelompok LGBTQIA+, dengan alasan untuk memberikan proteksi terhadap nilai-nilai tradisional dan juga melindungi anak-anak dari propaganda yang dianggap buruk oleh Rusia (Davis, 2023). Walaupun telah dikecam berkali-kali secara internasional, Rusia tetap tidak peduli dan memilih untuk melanjutkan untuk menginternasionalisasi LGBTQIA+ secara domestik dengan harapan bahwa hal ini

dapat mengurangi pengaruh hegemoni AS atau ideologi liberalisme di Rusia, serta menjaga nilai-nilai tradisional di tengah-tengah masyarakat Rusia (Lemziakov & Litvinov, 2024).

Sebelum memorandum Joe Biden dideklarasikan, pada tahun 2020 Rusia sempat mendapat rekomendasi oleh UN Human Rights Committee untuk memerangi diskriminasi yang terjadi terhadap kelompok LGBTQIA+ atau secara spesifik dapat didefinisikan sebagai diskriminasi terhadap orientasi seksual dan identitas gender. Namun kemudian Rusia memberi klaim bahwa kebijakan yang ada di negaranya merupakan suatu simbol atau pencerminan dari “norma-norma sosial yang sudah mapan” yang bertujuan untuk “melestarikan dan pengembangan untuk umat manusia” (The Advocates of Human Rights, 2022). Di tahun yang sama, pada bulan Juni yang bertepatan pada pride month, Kedutaan Amerika Serikat di Rusia mengibarkan bendera pelangi di depan kantor kedutaan Amerika Serikat yang menyimbolkan dukungan secara langsung untuk kelompok LGBTQIA+ sekaligus untuk menjalankan misi diplomatik AS bersamaan dengan kedutaan dan konsulat AS di seluruh dunia (Renkin & Trofimov, 2023).

Setahun setelah deklarasi memorandum perlindungan kelompok LGBTQIA+ secara global, pada tahun 2022, Invasi Rusia ke Ukraina terjadi, dimana pemerintah Rusia mengklaim bahwa perang ini merupakan bentuk dari perlindungan “nilai-nilai tradisional” dan perlawanan dari nilai-nilai Barat yang dianggap immoral, sekaligus menggunakan retorika anti-LGBTQIA+ sebagai bagian dari narasi invasi tersebut (Lemziakov & Litvinov, 2024). Invasi ini selanjutnya menjadi salah satu hal yang dikecam oleh AS, hingga setelahnya AS bersama dengan Uni Eropa memberikan sanksi berupa embargo ekonomi secara besar-besaran terhadap Rusia (European Council, 2023). Hal ini kemudian ditujukan untuk melemahkan Rusia agar menghentikan invasi tersebut.

Pada tahun 2023, saat embargo serta sanksi ekonomi lainnya masih berjalan, Rusia tetap memutuskan untuk memperketat hukum anti-LGBTQIA+ di negaranya dan memberi cap kelompok ekstremis terhadap kelompok LGBTQIA+, sehingga hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap kelompok tersebut menjadi semakin berat (Burga, 2023). Bahkan hingga saat ini, Rusia tetap berdiri pada pendiriannya untuk tidak memberikan akseptansi sama sekali terhadap kelompok LGBTQIA+ di negaranya, dan menjunjung tinggi hakikat nilai-nilai tradisional negaranya, serta nilai dari ajaran agama Kristen Ortodoks dalam penegakan hukumnya. Di sisi lain, AS terus memberikan kecaman terhadap Rusia, di samping sanksi yang diberikan atas invasi terhadap Ukraina, AS juga berkali-kali

memberikan *call out* terhadap Rusia atas diskriminasi yang saat ini terjadi di negaranya (Farber, 2023).

Secara garis besar, walaupun kedua negara memiliki hubungan diplomatik secara simbolis, tensi diantara keduanya masih cenderung besar, dan kedua negara tetap kukuh dengan hukum yang mereka miliki, dan tetap tidak peduli dengan berbagai *call out* atau bentuk kecaman antar satu sama lain. Namun kemudian, internasionalisasi LGBTQIA+ tersebut tidak berpengaruh secara besar dalam tensi diplomatik antar kedua negara. Perang Russia-Ukraina lah yang kemudian mengubah arah diplomatik antar kedua negara dan menurunkan intensitas kerja sama antar kedua negara (Novozhenina, 2024). Namun adanya internasionalisasi akseptansi LGBTQIA+ ini juga menjadi salah satu basis dari konflik Russia-Ukraina, dan mempengaruhi ketegangan hubungan diplomatik antara kedua negara. Saat ini terdapat beberapa perubahan dalam preferensi kerja sama antara kedua negara, salah satunya dalam aspek ekonomi (Bureau of European and Eurasian Affairs, 2024).

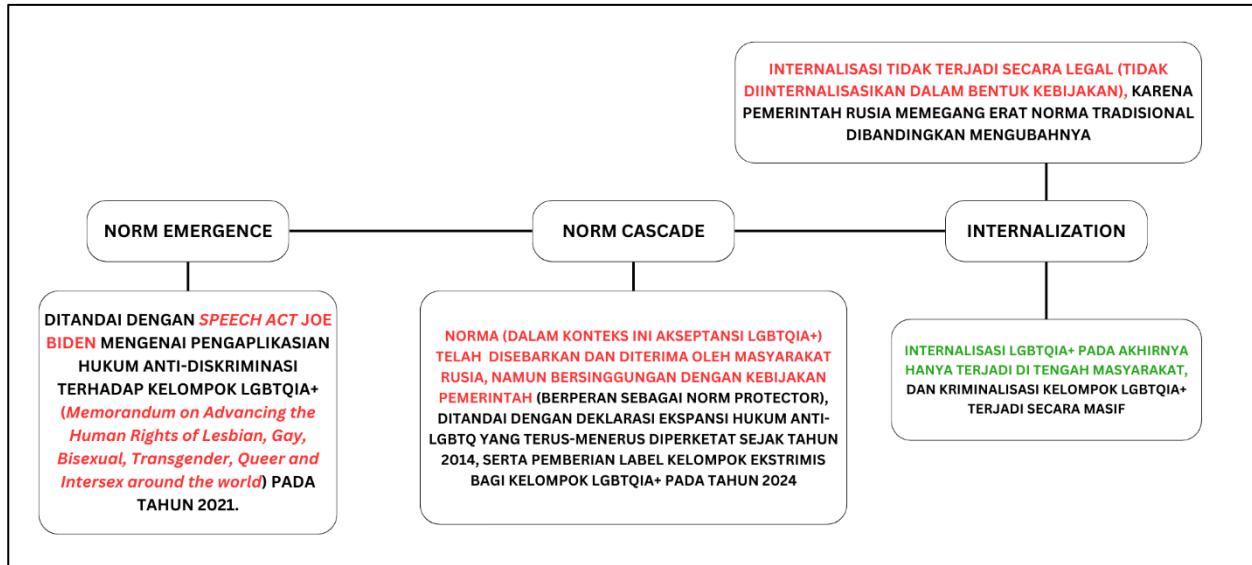
E. Interaksi AS dan Rusia dalam Teori Norm Life Cycle

Norma didefinisikan sebagai aturan perilaku yang diharapkan dalam suatu masyarakat atau sebagai perilaku yang umum dalam suatu Masyarakat (Morris-Martin et al., 2019). Menurut Finnemore dan Sikkink, Norma adalah segala suatu hal yang akan selalu berubah di tengah-tengah masyarakat seiring berjalannya waktu. Norma yang telah lama atau tidak sesuai dapat dicabut, digantikan dengan norma yang baru, atau dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat itu (Frantz & Pigozzi, 2018). Segala macam interaksi yang terdapat dalam hubungan antar AS dan Rusia dalam agenda politik LGBTQIA+ dapat dikaitkan dengan teori *norm life cycle* yang dikemukakan oleh Finnemore dan Sikkink. Teori ini menunjukkan tahapan bagaimana sebuah norma dapat masuk ke dalam suatu kelompok melalui adanya sistem multi agen dalam proses penyebaran norma tersebut.

Finnemore dan Sikkink menjelaskan bahwa norma dapat disebar melalui 3 tahap, yaitu *emergence*, *cascade*, dan *internalization*. Dalam tahap pertama, aktor atau agen-agen ini (dapat disebut sebagai *norm entrepreneur*) akan memperkenalkan norma yang mereka miliki terhadap masyarakat umum. *Norm entrepreneur* kemudian membujuk massa untuk mendukung norma-norma baru atau mengubah norma-norma yang sudah ada diantara masyarakat tersebut untuk mencapai perilaku yang diinginkan dalam suatu negara atau komunitas. Jika dikaitkan dengan studi kasus yang terdapat pada penelitian ini, hal ini dapat dikaitkan dengan AS (yang berperan sebagai *norm*

entrepreneur) dalam penyebaran ide akseptansi kelompok LGBTQIA+ secara global, terutama terhadap negara-negara konservatif seperti Rusia.

Gambar 3. Keselarasan Interaksi antara Amerika Serikat dan Rusia dalam agenda politik LGBTQIA+ dan teori Norm Life Cycle



Sumber: penulis

Walaupun sebelumnya agenda akseptansi LGBTQIA+ ini sudah ada sejak beberapa dekade sebelum memorandum akseptansi yang telah dideklarasikan oleh Joe Biden, bentuk akseptansi terhadap kelompok LGBTQIA+ hanya terjadi secara domestik atau di negara-negara bagian AS saja. Dengan adanya *Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex around the world* pada tahun 2021, menjadi suatu penanda dan seruan bahwa LGBTQIA+ harus diterima dalam lingkup global, tidak peduli dengan status negara tersebut. Memorandum ini dapat digambarkan sebagai salah satu bentuk dari suatu norma, dimana norma yang dimaksud adalah akseptansi kelompok LGBTQIA+ secara global. Joe Biden yang berperan sebagai *norm leader* mengajak massa untuk menyetujui adanya akseptansi kelompok LGBTQIA+ di sekitar mereka dan mengecam keras atas adanya tindakan diskriminasi baik dari individu, kelompok, atau bahkan negara.

Sebelum menuju ke tahap *cascade*, sebuah norma tidak akan langsung diterima atau disosialisasikan terhadap Masyarakat. Terdapat *tipping point* yang merupakan bentuk dari adanya pertentangan dan perselisihan yang terjadi di antara masyarakat, atau perdebatan mengenai akseptansi norma tersebut. Mengingat 74% dari penduduk Rusia beragama Kristen Ortodoks, dapat dikatakan bahwa membawa atau mengajak Masyarakat tersebut untuk menyetujui adanya akseptansi

LGBTQIA+ tentunya tidak akan berjalan semudah itu, karena menurut ajaran agama Kristen Ortodoks, LGBTQIA+ adalah suatu dosa dan perbuatan yang tidak pantas untuk dilegalkan. Oleh karena itu, pastinya akseptansi kelompok ini akan menjadi suatu hal yang sulit di tengah-tengah masyarakat Kristen Ortodoks yang konservatif. Namun kemudian, dengan adanya seruan-seruan tertentu, serta masuknya LSM-LSM barat ke dalam Masyarakat Rusia yang dapat memberikan sosialisasi norma atau akseptansi kelompok LGBTQIA+ secara baik, pada akhirnya akseptansi tersebut dapat tercapai di antara masyarakat Rusia, walaupun dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal secara hukum pada akhirnya. Dalam konteks ini, dapat diartikan bahwa tahapan *tipping point* dalam *norm life cycle* berhasil dilewati, maka selanjutnya suatu norma akan berada dalam tahap *cascade*.

Dalam tahap *cascade* dapat diartikan bahwa Masyarakat sudah mengenal norma tersebut, namun belum tersosialisasikan secara baik. Oleh karena itu, *norm entrepreneur* akan memberikan sosialisasi dan berbagai cara untuk mengajak massa agar dapat mengakseptansi norma yang dibawakan. Mekanisme semacam persuasi dapat dilakukan oleh suatu aktor/agen tertentu kepada pihak yang seharusnya menerima norma tersebut (Frantz & Pigozzi, 2018). Dalam konteks negara, bujukan atau persuasi tersebut akan bersandar pada kebutuhan negara untuk diakui sebagai anggota dari organisasi Internasional, mengingat adanya keinginan negara untuk mempertahankan posisinya di ranah Internasional. Adanya peran dari LSM-LSM atau NGO-NGO LGBTQIA+ AS yang berperan untuk menyuarakan akseptansi LGBTQIA+ terhadap Masyarakat Rusia, untuk mendapatkan simpati serta akseptansi di antara massa. Kemudian dapat ditelaah bahwa akseptansi LGBTQIA+ yang terdapat di tengah-tengah Masyarakat Russia dapat dicapai melalui adanya konsep *mass democracies*. Dalam konteks *mass democracies*, kelompok marjinal atau kelompok yang terpinggirkan akan mencari cara untuk menarik opini kelompok mayoritas atau massa untuk mengamankan hak-hak mereka. Salah satu strategi yang biasanya digunakan oleh kelompok tersebut adalah *respectability politics*, di mana dalam strategi ini, kelompok tersebut menunjukkan bahwa mereka bukan kelompok yang hadir untuk menolak norma yang ada di tengah-tengah masyarakat, melainkan hadir sebagai kelompok yang turut mengikuti norma dan aturan, tidak memberikan ancaman dan berperilaku “pantas”. Dari strategi tersebut, kelompok terpinggirkan ini berharap bahwa kelompok dominan/mayoritas akan melihat kesamaan dengan kelompok yang terpinggirkan dan akhirnya menganggap mereka dapat memiliki hak yang sama. Selain itu, kelompok-kelompok ini biasanya akan menyoroti anggota-anggota mereka yang paling dihormati seperti tokoh-tokoh penting dan menekankan bagaimana mereka mengikuti nilai-nilai yang ada pada kelompok yang dominan (Jones, 2022). Kelompok LGBTQIA+ yang ada di Russia cenderung menunjukkan dan menyuarakan bahwa

mereka pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat yang tunduk terhadap aturan, dan beraktivitas seperti individual dan masyarakat secara umum (Beyrer et al., 2018).

Walaupun norma berhasil disosialisasikan bahkan dinormalisasikan di tengah-tengah masyarakat, norma tersebut tidak semata-mata diterima oleh pemerintah Rusia secara baik. Pemerintah Rusia sangat teguh dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional serta keagamaan dalam penegakan hukumnya, sehingga akseptansi LGBTQIA+ dianggap sebagai suatu hal yang tidak wajar, dan melenceng jauh dari norma yang sudah ada. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Rusia tidak dapat menerima adanya norma tersebut, sehingga normalisasi ini hanya terjadi di Masyarakat dan tidak terjadi secara hukum atau *legal law*. Oleh karena itu, pada akhirnya internalisasi atau tahap ketiga dalam *norm life cycle* menurut Finnemore dan Sikkink hanya terjadi di level Masyarakat saja, dan kemudian tidak semua masyarakat dapat menerima kehadiran kelompok LGBTQIA+ di tengah-tengah Masyarakat yang konservatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara garis besar, penelitian ini membahas tentang bagaimana isu LGBTQIA+ dapat menjadi suatu isu politik yang intens dan berpengaruh terhadap hubungan diplomatik antar dua negara yang bertolak belakang secara ideologis. Penulis mengaplikasikan teori *norm life cycle* oleh Finnemore dan Sikkink sebagai basis pada analisa dalam pertentangan interaksi antar AS dan Rusia di dalam agenda akseptansi kelompok LGBTQIA+ yang dibawakan oleh AS. Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif, dimana sumber yang terdapat di penelitian ini hanya berdasar pada jurnal-jurnal, arsip kenegaraan, *press conference*, serta artikel-artikel terkait isu dan pembahasan dalam penelitian ini. Data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini berguna sebagai metode pembuktian akan adanya pengaruh Internasionalisasi LGBTQIA+ Amerika Serikat terhadap hubungan diplomatik AS-Rusia.

Dari data-data yang telah dikumpulkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa; *pertama* Joe Biden selaku pemimpin negara AS memiliki intensi untuk mempertahankan dan meningkatkan hegemoni negaranya dengan cara menyebarkan ideologi-ideologi liberal dengan basis Hak Asasi Manusia, dalam konteks ini dapat diartikan dengan adanya memorandum untuk menyebarkan akseptansi LGBTQIA+ secara global melalui *Memorandum on Protecting Rights of LGBTQ People Abroad* yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2021, dan memberikan “sanksi” terhadap negara-negara yang tidak ingin patuh terhadap memorandum tersebut. AS menunjukkan bahwa norma yang mereka bawakan merupakan suatu hal yang harus dipatuhi secara kolektif, tanpa ada pengecualian dan negara-negara yang bersifat konservatif juga harus mematuhi norma tersebut.

kedua, Rusia yang telah sejak lama mempertahankan nilai-nilai atau norma tradisional negaranya, tentunya tidak ingin ikut dalam mematuhi norma atau seruan akseptansi kelompok LGBTQIA+ tersebut, karena kelompok LGBTQIA+ dianggap sebagai kelompok yang “tidak masuk akal” dan hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran tradisional serta Kristen Ortodoks yang juga menjadi basis dalam pembuatan kebijakan Rusia. Oleh karena itu, sebagai respons terhadap seruan tersebut, dan melihat bagaimana pengaruh dari ideologi barat yang sangat signifikan secara Internasional, Rusia merasa terancam dan pada akhirnya memberikan Internasionalisasi anti *gay propaganda*, dimana hukum tersebut ditujukan untuk melimitasi hingga menghapus pengaruh atau “propaganda” barat yang berupa kelompok LGBTQIA+. Rusia kemudian ingin mempertahankan nilai-nilai

tradisional tersebut ke negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Ukraina dan Belarus, dan adanya ancaman-ancaman seperti pengaruh barat yang kental di Ukraina menyebabkan pecahnya konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022. Walaupun kecaman-kecaman dari AS telah dilayangkan, Rusia tetap tidak peduli dan terus memberikan Internasionalisasi anti *gay propaganda*, hingga pada tahun 2023, pemerintah Rusia secara resmi memberikan label kelompok ekstremis terhadap kelompok LGBTQIA+.

Ketiga, meskipun terdapat intensitas yang cukup panas di antara kedua negara, Rusia dan AS masih memiliki *common sense* secara diplomatik, dan keduanya masih memiliki hubungan kerja sama di beberapa bidang seperti nuclear security, nonproliferasi, keamanan regional Eropa dan Eurasia, serta perlawanan terhadap gerakan terorisme. Secara simbolis pun kedua negara masih memiliki gedung kedutaan yang menandakan adanya hubungan diplomatik dari kedua negara tersebut. Kemudian dapat disimpulkan bahwa adanya konflik ideologi dari negara-negara tersebut tidak semata-mata memutuskan hubungan diplomatik antara kedua negara, tetapi memengaruhi bagaimana cara negara tersebut bersikap antara satu sama lain. Penyebaran norma akseptansi LGBTQIA+ oleh AS masih dianggap sebagai ancaman bagi Rusia, dan pemerintah Rusia akan terus berupaya agar hal tersebut tidak menyebar lebih luas lagi dengan menggunakan Internasionalisasi secara berkelanjutan hingga saat ini. Internasionalisasi ini juga menjadi salah satu penyebab ketegangan hubungan diplomatik antara Rusia dan Amerika Serikat.

Pertentangan serta berbagai interaksi yang terjadi di dalam agenda politik LGBTQIA+ ini kemudian dapat ditelaah melalui teori *norm life cycle*, dimana *Norm life cycle* yang dikemukakan oleh Finnemore dan Sikkink merupakan salah satu teori yang paling dikenal dan merupakan awal dari perkembangan teori *norm life cycle*. Finnemore dan Sikkink menjelaskan kemunculan norma-norma baru dan pergeseran norma yang berdasar pada beberapa pertanyaan utama seperti dari mana norma-norma itu berasal, bagaimana norma-norma itu berubah, dan apa peran yang dimainkan norma dalam perubahan politik.

Jika dikorelasikan dengan dinamika hubungan LGBTQIA+ dapat disimpulkan bahwa akseptansi kelompok LGBTQIA+ merupakan bentuk dari suatu norma yang disebarkan oleh AS (selaku *norm entrepreneur*) secara Internasional melalui *speech act* Joe Biden pada *Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and Intersex Persons Around the World*. Akseptansi kelompok ini diperkenalkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan *awareness* dalam isu anti-diskriminasi terhadap kelompok LGBTQIA+ selaku

kelompok marjinal. *Speech act* ini merupakan aksi nyata dari *norm emergence* AS dalam agenda penyebaran akseptansi LGBTQIA+.

Dalam agenda ini, *norm emergence* telah berhasil dilewati, dan akseptansi LGBTQIA+ telah terbentuk di tengah-tengah masyarakat Rusia. Tahap selanjutnya setelah *norm emergence* adalah *norm cascade* atau tahap penyebaran norma. *Norm cascade* dapat digambarkan dengan adanya akseptansi di masyarakat, atau masyarakat yang sudah mengenal norma tersebut, dan tidak ada pertentangan dalam masyarakat mengenai kehadiran norma tersebut. Namun kemudian, adanya hambatan berupa aturan atau kebijakan pemerintah yang absolut, menyebabkan adanya pertentangan akseptansi norma di dalam tahap *cascading*. Rusia yang menentang keras adanya eksistensi kelompok LGBTQIA+ di masyarakat menyebabkan tidak adanya bentuk internalisasi norma secara legal (pembuatan peraturan, atau bentuk kebijakan perlindungan terhadap kelompok tersebut).

B. Saran

Karena penelitian ini hanya berfokus pada interaksi antara kedua negara dalam agenda politik LGBTQIA+ semenjak dari *Memorandum on Protecting Rights of LGBTQ People Abroad* yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2021, maka penelitian kedepannya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dari ekspansi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamczyk, A. (2019, 29. May). *Why are some places gay-friendly and not others?* <https://www.bbc.com/news/health-48337639>
- Al Jazeera. (2023). Russian court bans ‘LGBT movement’ as ‘extremist’ | LGBTQ News | Al Jazeera. *Al Jazeera and News Agencies*.
- Alfarauqi, M. dziqie aulia. (2017). Vladimir Putin dan Dekonstruksi Soft Power Rusia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2). <https://doi.org/10.18196/hi.62113>
- Allen, J., Bowman, B., Kamisar, B., Kapur, S., Korecki, N., Nicholas, P., Pettypiece, S., Reilly, R., Seitz-Wald, A., Smith, A., Tsirkin, J., Wong, S., Terkel, A. & Carman, J. (2024, 15. May). *Trump and Biden’s stances on key issues: Abortion, immigration, Israel and more*. <https://www.nbcnews.com/politics/2024-election/biden-trump-stance-issues-policies-president-race-rcna150570>
- Alper, A. & Shalal, A. (2021). *Biden calls for expanded efforts to protect LGBTQ rights globally* | Reuters. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-lgbt-idUSKBN2A42KF/>
- Andersson, J. (2022, 25. November). *Russia passes “Answer to Blinken” gay propaganda law*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-europe-63747732>
- AP News. (2022, 5. December). *Putin signs law expanding LGBT “propaganda” restrictions* | AP News. <https://apnews.com/article/putin-europe-business-gay-rights-3d08c68ecd95d41511d96336c4f1aa9e>
- Batueva, E. & Đorđević, V. (2017). A Study in LGBTQ Activism in Serbia and Russia after 1991: Different Countries, Common Issues? *Sexuality, Gender and Policy*, 1(1), 51–68. <https://doi.org/10.18278/sgp.1.1.4>

- Bertrand, N., Seligman, L. & Toosi, N. (2021, 2. April). *Biden's first big foreign policy speech calls out Russia, limits role in Yemen* - POLITICO. <https://www.politico.com/news/2021/02/04/biden-yemen-war-lgbtq-rights-465910>
- Beyrer, C., Wirtz, A. L., O'Hara, G., Léon, N. & Kazatchkine, M. (2018). No Support. *Human Rights Watch*, 14(11). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PMED.1002462>
- Bishin, B. G., Freebourn, J. & Teten, P. (2021). The Power of Equality? Polarization and Collective Misrepresentation on Gay Rights in Congress, 1989–2019. *Political Research Quarterly*, 74(4), 1009–1023. <https://doi.org/10.1177/1065912920953498>
- Bureau of European and Eurasian Affairs. (2024). *Russia Business Advisory* - United States Department of State. <https://www.state.gov/russia-business-advisory/>
- Burga, S. (2023, 4. December). *Russia's Court Ban Of the "LGBTQ Movement": What to Know* | TIME. <https://time.com/6342383/russias-court-ban-of-the-lgbtq-movement/>
- Buyantueva, R. (2018). LGBT Rights Activism and Homophobia in Russia. *Journal of Homosexuality*, 65(4), 456–483. <https://doi.org/10.1080/00918369.2017.1320167>
- Buyantueva, R. (2022). Cultural and geopolitical conflicts between the West and Russia: Western NGOs and LGBT activism. *Connexe*, 8, 148–167. <https://doi.org/10.5077/journals/connexe.2022.e1031>
- Cooley, A. & Nexon, D. H. (2020, 9. June). *How Hegemony Ends: The Unraveling of American Power*. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-06-09/how-hegemony-ends?check_logged_in=1&utm_medium=promo_email&utm_source=lo_flows&utm_campaign=article_link&utm_term=article_email&utm_content=20240626
- Davidson, J. W. (2022, 5. July). *A Brief History of the Path to Securing LGBTQ Rights*. https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/intersection-of-lgbtq-rights-and-religious-freedom/a-brief-history-of-the-path-to-securing-lgbtq-rights/
- Davis, C. (2023, 10. January). *Russian publisher investigated by authorities under new anti-LGBT law - lawmaker* | Reuters. <https://www.reuters.com/world/europe/russian-publisher-investigated-by-authorities-under-new-anti-lgbt-law-lawmaker-2023-01-10/>
- de Groot, K. (2022, 24. February). *Putin's motivation behind the attack on Ukraine* | Perryworldhouse. <https://global.upenn.edu/perryworldhouse/news/putins-motivation-behind-attack-ukraine>

- Edenborg, E. (2023). Anti-Gender Politics as Discourse Coalitions: Russia's Domestic and International Promotion of "Traditional Values." *Problems of Post-Communism*, 70(2), 175–184. <https://doi.org/10.1080/10758216.2021.1987269>
- Eldridge, A. (2022). *Sexual orientation | Definition, Terms, Examples, & Attraction | Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/sexual-orientation>
- Engelstein, L. (1995). Soviet Policy Toward Male Homosexuality. *Journal of Homosexuality*, 29(2–3), 155–178. https://doi.org/10.1300/J082v29n02_06
- Epstein, K. (2024, 12. March). *Florida settles lawsuit over LGBT education bill*. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-68541059>
- European Council. (2023, 12. October). *Impact of sanctions on the Russian economy - Consilium*. <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/impact-sanctions-russian-economy/>
- Fábíán, K., Johnson, J. E. & Lazda, M. I. (2021). *The Routledge handbook of gender in Central-Eastern Europe and Eurasia*.
- Farber, G. T. (2023, 1. December). *UN rights chief says Russia should repeal laws targeting LGBT people | Reuters*. <https://www.reuters.com/world/europe/un-rights-chief-says-russia-should-repeal-laws-targeting-lgbt-people-2023-11-30/>
- Frantz, C. K. & Pigozzi, G. (2018). *MODELING NORM DYNAMICS IN MULTI-AGENT SYSTEMS*.
- Gilliam, J. & Stern, J. (2022). U.S. Diplomacy for LGBTQIA+ Rights Around the World: A Snapshot and a Look Forward | Wilson Center. *Wilson Center*.
- Gosselin, J. T. & Bombardier, M. (2019). Gender Dysphoria¹. *Psychopathology: Foundations for a Contemporary Understanding: Fifth Edition*, 521–536. <https://doi.org/10.4324/9780429028267-23/GENDER-DYSPHORIA-1-JENNIFER-GOSSELIN-MICHAEL-BOMBARDIER>
- Grove, T. (2013, 12. June). *Russia passes anti-gay law, activists detained | Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-russia-gay-idUSBRE95A0GE20130611/>
- Harrington, A. (2010). *The Gay Rights Movement In Illinois: A History - CBS Chicago*. <https://www.cbsnews.com/chicago/news/the-gay-rights-movement-in-illinois-a-history/>
- HRC. (2021). *Stances of Faiths on LGBTQ+ Issues: Eastern Orthodox Church - Human Rights Campaign*. <https://www.hrc.org/resources/stances-of-faiths-on-lgbt-issues-eastern-orthodox-church>

- Jones, P. E. (2022). Respectability Politics and Straight Support for LGB Rights. *Political Research Quarterly*, 75(4), 935–949. <https://doi.org/10.1177/10659129211035834>
- Khoroshilova, O. (2017, 10. November). *1917 Russian Revolution: The gay community's brief window of freedom*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-41737330>
- Kislitsyna, P. (2020a). *ARE RELIGION AND QUEERNESS INCOMPATIBLE?* <https://www.ebsco.com/terms-of-use>
- Kislitsyna, P. (2020b). *Religious Experiences in Life Stories of Homosexuals and Bisexuals in Russia*. <https://www.ebsco.com/terms-of-use>
- Lemziakov, I. & Litvinov, Y. V. (2024, 19. February). *Russia's Anti-LGBTQ+ "Extremism" Ruling: A Global Warning*. <https://www.kettering.org/news/russias-anti-lgbtq-extremism-ruling-a-global-warning/>
- Levin, S. (2017). *"Huge validation": Oregon becomes first state to allow official third gender option | Oregon | The Guardian*. <https://www.theguardian.com/us-news/2017/jun/15/oregon-third-gender-option-identity-law>
- Litvinova, D. (2024, 7. March). *Putin's crackdown casts a wide net, ensnaring the LGBTQ+ community, lawyers and many others | AP News*. <https://apnews.com/article/russia-putin-crackdown-opposition-lgbtq-election-d9c96f550e6c0cb61363003c735fabec>
- Lukyanov, F. A. (2021). *VIDEO: Plenary Session at the 18th Annual Meeting of the Valdai Discussion Club — Russia in Global Affairs*. <https://eng.globalaffairs.ru/articles/video-plenary-session-valdai/>
- Macrae, A. P. (n.d.). *Hegemonic negotiation and LGBT representation in contemporary teen films*.
- Mas'ood, M. (1990). *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Disiplin dan Metodologi* (Vol. 1). LP3ES.
- Medina, C., Gruberg, S. & Mahowald, L. (2021, 21. January). *Improving the Lives and Rights of LGBTQ People in America - Center for American Progress*. <https://www.americanprogress.org/article/improving-lives-rights-lgbtq-people-america/>
- Moreau, J. (2022, 20. August). *Number of LGBTQ elected officials in U.S. doubled since 2017*. <https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/number-lgbtq-elected-officials-us-doubled-2017-rcna43946>
- Morris-Martin, A., De Vos, M. & Padget, J. (2019). Norm emergence in multiagent systems: a viewpoint paper. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 33(6), 706–749. <https://doi.org/10.1007/s10458-019-09422-0>

- Novoderezhkin, A. (2022). *Report on the state of civil society in the Russian Federation*.
<https://report2022.oprf.ru/en/index.html>
- Novozhenina, E. (2024). *Russia says it may downgrade ties with US if its assets are confiscated* | Reuters.
<https://www.reuters.com/world/russia-says-it-may-downgrade-ties-with-us-if-its-assets-are-confiscated-2024-04-25/>
- Picq, M. Lavinias. & Thiel, M. (2015). *Sexualities in World Politics : how LGBTQ claims shape international relations*.
- Rahman, M. (2019). What Makes LGBT Sexualities Political? Understanding Oppression in Sociological, Historical, and Cultural Context. *The Oxford Handbook of Global LGBT and Sexual Diversity Politics*, 13–29. <https://doi.org/10.1093/OXFORDHB/9780190673741.013.2>
- Rajvanshi, A. (2022). *What To Know About Russia’s So-Called ‘Gay Propaganda’ Bill* | TIME.
<https://time.com/6236822/russia-gay-propaganda-law-discrimination/>
- Renkin, H. Z. & Trofimov, V. (2023). The Global Dialectics of Homonationalism and Homophobia. In *Sexuality and Culture* (Vol. 27, Issue 6, pp. 1987–1995). Springer. <https://doi.org/10.1007/s12119-023-10154-3>
- Richter, A. (2018). The Norm Life Cycle of UN Reform: “Delivering as One and UN System-Wide Coherence” The Norm Life Cycle of the UN Reform: “Delivering as One and UN System-Wide Coherence.” In *Journal of International Organizations Studies* (Vol. 8, Issue 2).
<https://sciencespo.hal.science/hal-03440908>
- Sauer, P. (2023). *Russia outlaws ‘international LGBT public movement’ as extremist* | LGBTQ+ rights | *The Guardian*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2023/nov/30/russia-supreme-court-outlaws-lgbt-movement>
- Serhan, Y. (2023, 21. April). *How Putin Inadvertently Boosted LGBT Support in Ukraine* | TIME.
<https://time.com/6273445/putin-lgbt-rights-ukraine-russia/>
- Smith, P. & Litvinova, D. (2024, 16. February). *Greece just legalized same-sex marriage. Will other Orthodox countries join them any time soon?* | AP News. <https://apnews.com/article/same-sex-marriage-orthodox-church-greece-lgbtq-16b1f311b703d228301a5e5713069cd3>
- Stepanova, E. A. (2022). “Everything good against everything bad”: traditional values in the search for new Russian national idea. *Zeitschrift Für Religion, Gesellschaft Und Politik*, 7(1), 97–118.
<https://doi.org/10.1007/s41682-022-00123-2>

- Superville, D. (2023). *Biden condemns wave of state legislation restricting LGBTQ+ rights, says “these are our kids”* | AP News. <https://apnews.com/article/biden-pride-lgbtq-white-house-ddd40bb1a1110654b9d836e87507db51>
- Szulc, L. (2018). Globalization of LGBT Identities and Politics. *Transnational Homosexuals in Communist Poland*, 25–59. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58901-5_2
- The Advocates of Human Rights. (2022). *Russia’s Compliance with International Convention on Civil and Political Rights: LGBTI Rights Submitted by The Advocates for Human Rights a non-governmental organization in special consultative status with ECOSOC since 1996 and Moscow Community Center for LGBT+ Initiatives for the 134th Session of the Human Rights Committee 28th*. www.TheAdvocatesForHumanRights.org
- The Russian Government. (2022). *Government Decisions - The Russian Government*. <http://government.ru/en/docs/46080/>
- The White House. (2021). *Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and Intersex Persons Around the World* | The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/04/memorandum-advancing-the-human-rights-of-lesbian-gay-bisexual-transgender-queer-and-intersex-persons-around-the-world/>
- The White House. (2023). *FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces New Actions to Protect LGBTQI+ Communities* | The White House.
- Thiel, M. (2014). LGBT Politics, Queer Theory, and International Relations. *Relations, E-International*, 2012, 4–7.
- Thoreson, R. (2015). *From Child Protection to Children’s Rights: Rethinking Homosexual Propaganda Bans in Human Rights Law*. <http://perma.cc/Y2WQ-EFXH>].
- U.S. DEPARTMENT OF STATE. (2010). *2009-2010 Results of the U.S.-Russia Presidential Commission* .
- Waxman, O. B. (2022, 30. August). *Mikhail Gorbachev Dead: What Are Glasnost and Perestroika?* | TIME. <https://time.com/5512665/mikhail-gorbachev-glasnost-perestroika/>
- Weber, C. (2016). Queer International Relations. In *Queer International Relations*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199795857.001.0001>

Weiland, N. (2024). *Biden Administration Restores Health Protections for Gay and Transgender People* - *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2024/04/26/us/politics/biden-gay-transgender-health-care.html>

WHO. (2012). WHO | What do we mean by “sex” and “gender”? *WHO*.

LAMPIRAN


A. BIODATA



Nama : Elva Ray Zabrina
Tempat dan Tanggal Lahir : Samarinda, 5 Juli 2002
Alamat : Jl. A. W. Syahrani, komplek Perumahan
Guru SD, BLOK D no.12A, kecamatan
Samarinda Ulu, kelurahan Air Hitam, kota
Samarinda, Kalimantan Timur

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
E-mail : elvaray572@gmail.com
Jurusan : S1 Hubungan Internasional
NIM : 2011102434039

B. BERITA ACARA BIMBINGAN



UMKT
Program Studi
Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik

Telp. 0541-748511 Fax. 0541 - 766832
Website [http : //fishum.umkt.ac.id](http://fishum.umkt.ac.id)
Email : fishum@umkt.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

FORMULIR BIMBINGAN PENYUSUNAN PROPOSAL/LAPORAN TA



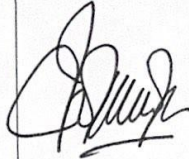
Nama Mahasiswa : Elva Ray Zabrina

NIM : 2011102434039







Dosen Pembimbing : M. Dziqie Aulia Al Farauqi, S.IP., M.A


Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Pengaruh Ekspansi Hukum Lgbtqia+ Amerika Serikat Terhadap Hubungan Diplomatik Russia-Amerika

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Hasil/Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	Jumat, 27/3/2024	- Fiksasi judul - Sesuaikan penduan	- Lanjutkan & fiksikan Bab I - Cari teori yang relevan	
2	Jumat, 22/3/2024	- Pembahasan teori - Name life cycle LGBTQ theory	- lanjutkan bab II & III	
3	Jumat 26/4/2024.	- Pembahasan bab I, II III	- lanjutkan ke bab IV	

Kampus 1 : Jl. Ir. H. Juanda, no.15, Samarinda
Kampus 2 : Jl. Pelita, Pesona Mahakan, Samarinda

4.	Selasa, 14/5/24	- Pembahasan teori	→ Fisik: Bab I Fisik: Bab IV	
5	Selasa, 21/5/24	→ teori worm life cycle → teori Saimuru → Nama cascade. → Berikan graft di Pembahasan	→ Berikan graft tentang Nama ferpreneur & Nama Protector di hasil & Pembahasan	
6	Kamis, 23/5/24	• revisi minor BAB II & IV		
7.	Jumat ²⁹ /5/24	• acc BAB II • revisi BAB IV		
8.	Selasa, ²⁸ /5/24	• acc BAB IV, lanjut BAB V		
9.	Rabu, 5/6/24	• revisi BAB V		


10.	Komis 13/ 16/04	o Acc kripti, layak maju sidang		
-----	--------------------	---------------------------------------	--	---

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Khoirul Amin, S.IP., M.A
NIDN. 1115119001

Samarinda, 14 Maret 2024

Mahasiswa


Elva Ray Zabrina
NIM. 2011102434039

C. HASIL UJI TURNITIN



PENGARUH
INTERNASIONALISASI
LGBTQIA+ AMERIKA SERIKAT
TERHADAP HUBUNGAN
DIPLOMATIK RUSSIA-AS

by Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Kalimantan
Timur

Submission date: 25-Jul-2024 04:53PM (UTC+0800)

Submission ID: 2422203549

File name: SKRIPSI_Elva_Ray_Zabrina_2011102434039.docx (759.06K)

Word count: 12929


Character count: 88113

PENGARUH INTERNASIONALISASI LGBTQIA+ AMERIKA SERIKAT TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK RUSSIA-AS

ORIGINALITY REPORT

6% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	1% PUBLICATIONS	1% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	report2022.oprf.ru Internet Source		1%
2	www.astrid-online.it Internet Source		<1%
3	www.neliti.com Internet Source		<1%
4	www.scribd.com Internet Source		<1%
5	it.wikipedia.org Internet Source		<1%
6	www.semanticscholar.org Internet Source		<1%
7	repository.unair.ac.id Internet Source		<1%
8	123dok.com Internet Source		<1%
9	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source		<1%